



PEMERINTAH KOTA BEKASI



Setda
Kantor Walikota



LKIP 2023

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Bekasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur, LKIP juga bentuk bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bekasi menuju +terwujudnya good governance dan clean governance serta sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali/pemacu dalam peningkatan kinerja di lingkup Sekretariat Daerah dimana Kinerja tersebut diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023.

Adapun substansi pada LKIP ini antara lain menguraikan sasaran yang telah dicapai berdasarkan Misi Sekretariat Daerah, juga memuat deskripsi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian/solusi berikut tindaklanjut yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut. Sehingga diharapkan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh aparatur Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang. Dalam penyusunan LKIP ini kami telah berupaya secara optimal dengan mengikuti sistematika serta berpedoman pada peraturan-peraturan diatas, namun Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi ini sangat kami harapkan. Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 ini menjadi bagian dari konsistensi kami terhadap komitmen untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja secara terukur dan akuntabel.

Bekasi, Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH



Drs. JUNAEDI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2023 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2018-2023 beserta perubahannya.

Secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2023 dinyatakan “melampaui target”, karena capaiannya rata-rata sebesar 103,71% dari target, dengan rata-rata capaian indikator strategis melebihi target yang sudah di tetapkan. dengan hasil capaian realisasi kinerja rata-rata sebesar 103,71% ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang SANGAT BAIK atas 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023 berhasil memanfaatkan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan guna mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2023 sebesar Rp 221.051.910.162,00,- dengan total efisiensi penggunaan anggaran sebesar 11,02.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Organisasi.....	7
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	10
1.4 Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi.....	12
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Perencanaan Strategis	19
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	20
2.1.2 Misi Kepala Daerah	20
2.1.3 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....	22
2.1.4 Indikator Kinerja Utama.....	24
2.1.5 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	26
2.2 Perjanjian Kinerja.....	31
2.3 Rincian Anggaran Tahun 2023	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	37
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	39
3.3 Analisis Capaian Kinerja.....	42
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	100
3.5 Prestasi Dan Penghargaan.....	106
BAB IV PENUTUP	108
4.1 kesimpulan	108
4.2 Rencana Tindak	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112
LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja.....	113

LAMPIRAN 2 : Perjanjian Kinerja Perubahan	116
LAMPIRAN 3 Rincian Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2023	118
LAMPIRAN 4 Realisasi Fisik Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.....	122
LAMPIRAN 5 Prestasi Dan Penghargaan.....	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Status Kepegawaian	14
Tabel 1. 2	Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	15
Tabel 1. 3	Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jabatan.....	16
Tabel 1. 4	Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan	16
Tabel 2. 1	Ringkasan Visi dan Misi RPJMD Perubahan Kota Bekasi 2018-2023	20
Tabel 2. 2	Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 beserta perubahannya	23
Tabel 2. 3	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bekasi	25
Tabel 2. 4	Strategi, Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	28
Tabel 2. 5	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi	32
Tabel 2. 6	Alokasi Anggaran Per Triwulan (APBD-P TA 2023)	33
Tabel 2. 7	Anggaran Per Sub Kegiatan (Perubahan)	33
Tabel 3. 1	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023	40
Tabel 3. 2	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Capaian IKK yang meningkat	44
Tabel 3. 3	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat	45
Tabel 3. 4	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat dengan Target Akhir Renstra 2018-2023	46
Tabel 3. 5	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama... ..	47
Tabel 3. 6	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat	48
Tabel 3. 7	Analisis Pencapaian Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan	49
Tabel 3. 8	Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2023.....	50
Tabel 3. 9	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Utama Indeks Pelaksanaan Pembangunan	54

Tabel 3. 10	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Pelaksanaan Pembangunan Target Akhir Renstra 2018-2023	55
Tabel 3. 11	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran	57
Tabel 3. 12	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 Dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan.....	58
Tabel 3. 13	Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD di Kota Bekasi.....	61
Tabel 3. 14	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi.....	62
Tabel 3. 15	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi.....	67
Tabel 3. 16	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi Target Akhir Renstra 2018-2023	68
Tabel 3. 17	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran	68
Tabel 3. 18	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 Dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi	69
Tabel 3. 19	Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023	71
Tabel 3. 20	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP SETDA	72
Tabel 3. 21	Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi.....	72
Tabel 3. 22	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP SETDA	74
Tabel 3. 23	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP SETDA terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023	75
Tabel 3. 24	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran	76
Tabel 3. 25	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP SETDA	78
Tabel 3. 26	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai IKM SETDA	79

Tabel 3. 27	Hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2023	80
Tabel 3. 28	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Utama Nilai IKM SETDA.....	83
Tabel 3. 29	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai IKM SETDA Target Akhir Renstra 2018-2023	84
Tabel 3. 30	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran	85
Tabel 3. 31	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 Untuk untuk Indikator Kinerja Nilai IKM SETDA	87
Tabel 3. 32	Perbandingan IKM Setda dengan OPD lain	87
Tabel 3. 33	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	91
Tabel 3. 34	Rekapitulasi Perbandingan Hasil Evaluasi AKIP	92
Tabel 3. 35	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	96
Tabel 3. 36	Perkembangan Nilai AKIP Kota Bekasi.....	96
Tabel 3. 37	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023	99
Tabel 3. 38	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	99
Tabel 3. 39	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 dengan tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	100
Tabel 3. 40	Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Per Program Tahun 2023	101
Tabel 3. 41	Pagu Dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Program Tahun 2023	101
Tabel 3. 42	Pagu Dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Sub Kegiatan Tahun 2023	102
Tabel 3. 43	Prestasi dan penghargaan Yang Diperoleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023	106
Tabel 4. 1	Capaian dari IKU tahun 2023.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi.....	10
Gambar 1. 2	Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Status Kepegawaian	15
Gambar 1. 3	Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Gambar 1. 4	Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jabatan.....	16
Gambar 1. 5	Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan	17
Gambar 3. 1	Grafik Perkembangan Nilai EPPD Kota Bekasi Tahun 2018-2023	44
Gambar 3. 2	Grafik Perkembangan Nilai SKM Sekretariat Daerah	82



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban Sekretaris Daerah atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dan sasaran

Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama tahun 2023 menuju perwujudan Visi Kota Bekasi yaitu :

“Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”

Laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Setda Kota Bekasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2023 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Setda Kota Bekasi pada tahun yang akan datang.

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Bekasi mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, melalui pelaksanaan Misi pertama **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”** dengan Tujuan **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan**

akuntabel”, dan Sasaran dari Tujuan Misi I tersebut yaitu **“Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah”** dengan indikator kinerja “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, “Nilai Hasil Pencapaian IKK dalam EPPD” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik”

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi yang termaktub dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023, maka dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2021 Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dimana indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang tercantum dalam perubahan tersebut adalah :

1. Indikator Kinerja utama **Persentase Capaian IKK yang meningkat** untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah yaitu Meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi ke ke-I RPJMD kota bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Nilai Hasil Pencapaian IKK dalam EKPPD.

2. Indikator Kinerja utama (1) **Indeks Pelaksanaan Pembangunan**; dan (2) **Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi**; untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi ke ke-I RPJMD kota bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Nilai Hasil Pencapaian IKK dalam EKPPD.
3. Indikator Kinerja utama (1) **Nilai AKIP SETDA**; (2) **Nilai IKM SETDA**; dan (3) **Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas**; untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi ke ke-I RPJMD kota bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Penentuan IKU ini didasarkan pada pencapaian 8 (delapan) area perubahan Indeks Reformasi Birokrasi yang menjadi indikator tujuan pada RPJMD 2018-2023, dimana lima area perubahan yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, akuntabilitas, dan pelayanan publik dilaksanakan dengan Sekretariat Daerah sebagai *leading sector*.

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah tahun 2022 dimana capaian Persentase Capaian IKK yang

meningkat memperoleh capaian kinerja sebesar 120,07 persen, indikator Nilai IKM memperoleh capaian kinerja sebesar 105,66 persen, indikator Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas memperoleh capaian kinerja sebesar 157,23 persen, Indeks pelaksanaan pembangunan memperoleh capaian sebesar 101,20 persen dan indikator Persentase BUMD yang di bina dan diawasi memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen, maka pada tahun 2023 Sekretariat Daerah harus bisa meningkatkan kinerja baik terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2022 maupun target yang telah ditetapkan pada Renstra pada tahun 2023. Adapun kinerja yang ditingkatkan pada tahun ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat pada tahun 2022 memperoleh capaian kinerja sebesar 120,07 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 46,83 persen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 39 persen. Target kinerja yang harus dicapai tahun 2023 adalah 40 persen, maka tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah adalah memastikan bahwa IKK tahun 2023 minimal dari 127 IKK yang ada di Kota Bekasi 51 IKK meningkat.
2. Untuk indikator Nilai IKM pada tahun 2022 memperoleh capaian kinerja sebesar 105,66 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 86,64 nilai indeks dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 82 nilai indeks. Target kinerja yang harus dicapai tahun 2023 adalah 83 nilai indeks, dimana artinya tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah adalah memastikan bahwa

Nilai IKM pada tahun 2022 minimal sebesar 86,65 nilai indeks atau meningkat dari realisasi tahun 2022.

3. Untuk indikator Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas pada tahun 2022 memperoleh capaian kinerja sebesar 157,23 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 25 persen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 15,90 persen. Target kinerja yang harus dicapai tahun 2023 sebesar 22,73 persen.
4. Untuk indikator Persentase BUMD yang di bina dan diawasi pada tahun 2022 memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 100 persen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen maka tantangan kedepan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah memastikan bahwa Persentase BUMD yang di bina dan diawasi pada tahun 2023 tetap 100 persen. Adapun upaya yang perlu dilakukan di tahun 2023 adalah :
 - a. Evaluasi dan monitor serta bimbingan (couching) kesemua BUMD secara rutin oleh Pembina BUMD yang dilakukan minimal setahun dua kali, untuk memastikan bahwa Good Corporate Governance (GCG) dalam sistem tata kelola manajemen perusahaan dijalankan dengan baik sehingga menghasilkan Kinerja Unggul (Performance Excellence);
 - b. Melakukan penilaian tingkat kesehatan keuangan dan non keuangan BUMD dalam hubungannya dengan kemampuan dalam menjalankan usahanya dan kontribusi terhadap PHD.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk pembahasan lebih lanjut secara komprehensif kinerja Sekretariat Daerah pada tahun

2023 sesuai Perjanjian Kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (Akuntabilitas Kinerja) pada Laporan Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2023 ini.

1.2 Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Organisasi

Kedudukan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Peraturan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Selanjutnya untuk mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki tugas tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang meliputi bidang pemerintahan,

perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum untuk mencapai visi dan misi daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum;
- c. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- d. Pemberdayaan sumber daya aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana Perangkat Daerah;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
- f. Pembinaan serta pengembangan organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah;
- g. Pembinaan kesadaran hukum dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah;
- h. Pembinaan pelaksanaan hubungan dan/atau kerja sama pembangunan antar Daerah, antar Daerah dengan Pemerintah, antar Daerah dengan lembaga lainnya;
- i. Perumusan bahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota;
- j. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Wali Kota;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota;

1. Penyampaian laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kinerja Setda sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

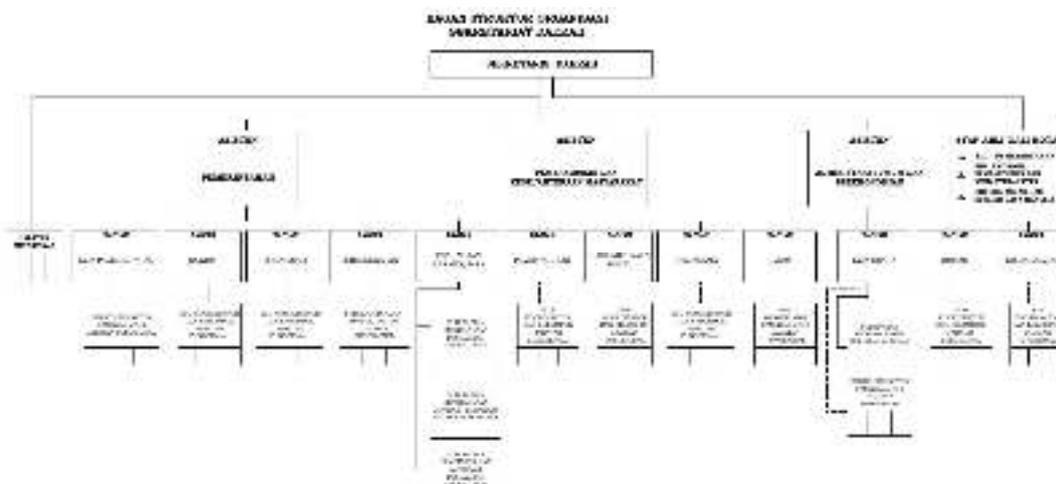
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- c. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan;
- d. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Asisten Pemerintahan, membawahkan:
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum;
 3. Bagian Organisasi;
 4. Bagian Perlengkapan.
- f. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, membawahkan:
 1. Bagian Pembangunan;
 2. Bagian Kesejahteraan Sosial;
 3. Bagian Kerjasama.
 4. Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

- c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- g. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian, membawahkan:
 - 1. Bagian Umum;
 - 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
 - 3. Bagian Humas;
 - 4. Bagian Perekonomian;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah seperti pada gambar berikut:

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi



1.3 Aspek Strategis Organisasi

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04

“perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya”.

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Peraturan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang memiliki peranan terhadap pelaksanaan:

Dalam melaksanakan perannya sebagai instansi yang memastikan bahwa pencapaian visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota maju, sejahtera dan ihsan didukung oleh kebijakan yang tepat, koordinasi yang efisien dan organisasi yang tepat ukuran, Sekretariat Daerah Kota Bekasi selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *good governace*. Sekretariat Daerah memprioritaskan pada peningkatan profesionalisme dan mutu layanan serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Melihat dari tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat bahwa Sekretariat Daerah Kota Bekasi memiliki tugas lebih bersifat administratif. Kesempurnaan mekanisme sistem perencanaan, penganggaran biaya, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan keinginan yang dicita-citakan. Adapun permasalahan utama dan isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Belum Optimalnya pengkoordinasian Perangkat Daerah dalam proses perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- c. Belum Optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. belum terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi serta dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan; dan
- e. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pencapaian kinerja organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kota Bekasi merumuskan program dan kegiatan yang merujuk kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2013-2018. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yang diantaranya memuat visi, misi, kebijakan, tujuan, sasaran dengan Indikator kinerja yang terukur yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bekasi.

1.4 Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Bekasi menyelenggarakan beberapa layanan publik yang dilaksanakan oleh 12 unit layanan dan sudah dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki saat ini, yaitu:

1. Pelayanan Desk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD).

2. Pelayanan Legal Drafting Produk Hukum Daerah.
3. Pelayanan Penomoran Produk Hukum Daerah.
4. Pelayanan Bantuan Hukum.
5. Pelayanan Pemberian Pendapat Hukum.
6. Pelayanan Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
7. Pelayanan Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
8. Pelayanan Peningkatan Kinerja dan RB.
9. Pelayanan Penyusunan Standar Pelayanan.
10. Pelayanan Desk SAKIP
11. Pelayanan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
12. Pelayanan Evaluasi Kelembagaan.
13. Pelayanan Rekomendasi Penerima Hibah Di Kota Bekasi.
14. Pelayanan Pendirian Rumah Ibadat Di Kota Bekasi.
15. Pelayanan Evaluasi Naskah Kerjasama.
16. Pelayanan Fasilitasi Penyusunan Naskah Kerjasama.
17. Pelayanan Rencana Kerjasama.
18. Pelayanan Pendaftaran Calon Penyedia
19. Pelayanan Asistensi RKA satuan Kerja Yang Berhubungan Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
20. Pelayanan Penyusunan Standar Biaya Umum.
21. Pelayanan Administrasi dan Fasilitasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
22. Pelayanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Acara.
23. Pelayanan Peminjaman Ruang Aula.
24. Pelayanan Penyediaan Makanan dan Minuman.

25. Pelayanan Pemeliharaan Gedung Kantor.
26. Pelayanan Penomoran Surat.
27. Pelayanan Surat Masuk.
28. Pelayanan Penyerahan Piala Kepala Daerah.
29. Pelayanan Keprotokolan.
30. Pelayanan Fasilitasi Kunjungan Daerah Ke Pemerintahan Kota Bekasi.
31. Pelayanan Permohonan Informasi Publik Ke Pemkot Bekasi.

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan layanan adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Sekretariat Daerah Kota Bekasi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 412 orang per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

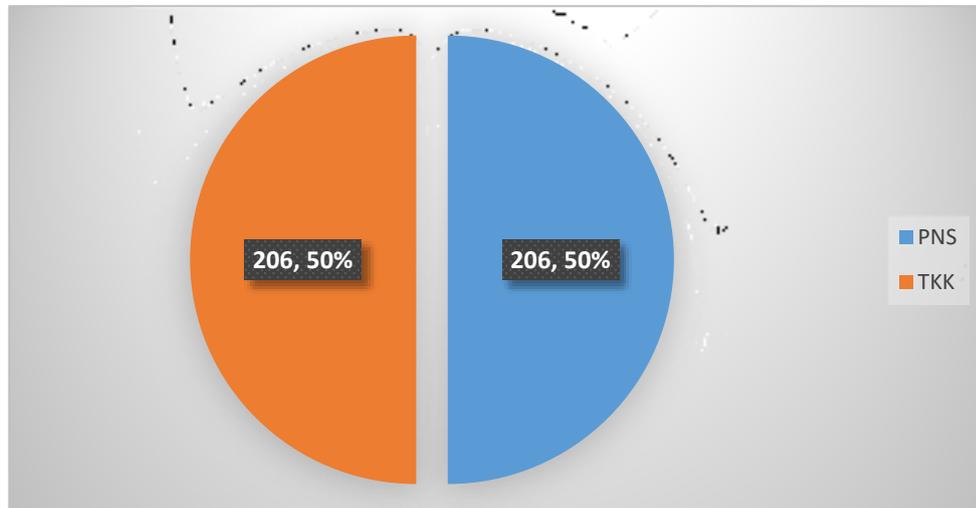
Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1. 1
Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Berdasarkan Status Kepegawaian

PNS	TKK
206	206

Sumber : Bagian Tata Usaha Setda, Per 31 Desember 2023

Gambar 1. 2
Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Status Kepegawaian



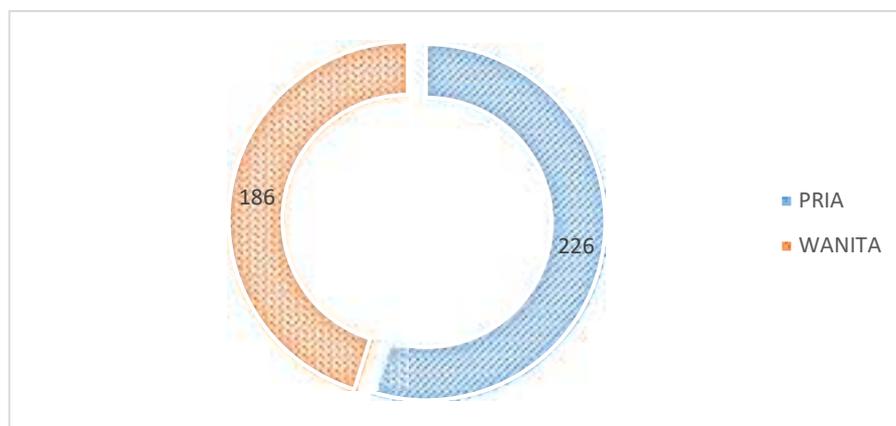
Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1. 2
Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin

PRIA	WANITA
226	186

Sumber : Bagian Tata Usaha Setda, Per 31 Desember 2023

Gambar 1. 3
Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin



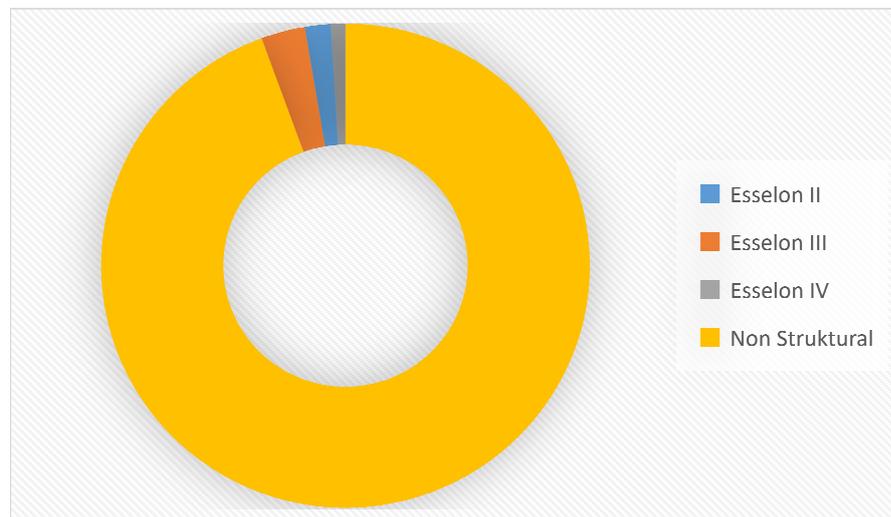
Berdasarkan Jabatan

Tabel 1. 3
Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Berdasarkan Jabatan

NO	ESSELONERING	JUMLAH APARATUR
1	Esselon II	7
2	Esselon III	12
3	Esselon IV	4
4	Non Struktural	389

Sumber : Bagian Tata Usaha Setda, Per 31 Desember 2023

Gambar 1. 4
Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah
Kota Bekasi Berdasarkan Jabatan



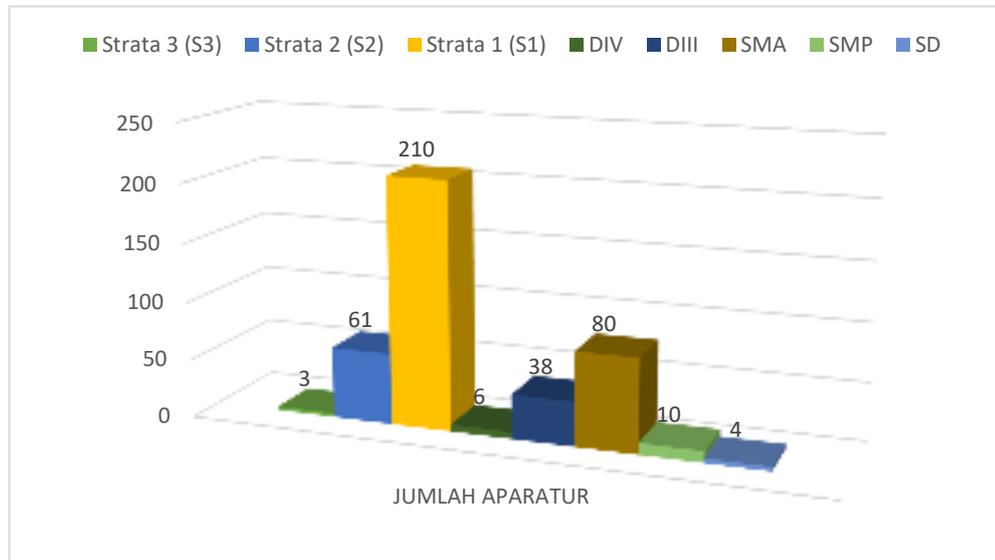
Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1. 4
Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH APARATUR
1	Strata 3 (S3)	3
2	Strata 2 (S2)	61
3	Strata 1 (S1)	210
4	DIV	6
5	DIII	38
6	SMA	80
7	SMP	10
9	SD	4

Sumber : Bagian Tata Usaha Setda, Per 31 Desember 2023

Gambar 1. 5
Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan



1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2018-2023

- B. Tujuan
- C. Sasaran Strategis
- D. Sasaran Program
- E. Indikator Kinerja Utama
- F. Program dan Kegiatan
- G. Perjanjian Kinerja 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi (sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum)
- B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama
- C. Akuntabilitas Anggaran (Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan dokumen kontrak kinerja)
- D. Prestasi Organisasi (mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional dalam tahun 2023)

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rencana Tindak



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dengan diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumberdayanya untuk mencapai strategi ini. Perencanaan Strategis (Strategic Planning) adalah sebuah

alat manajemen yang digunakan untuk mengelola potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Bekasi untuk untuk melakukan proyeksi kondisi masa yang akan datang, sehingga rencana strategis dapat menjadi sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja ke masa yang akan datang.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Memperhatikan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018 - 2023, ditetapkan visi Pemerintah dan masyarakat Kota Bekasi adalah :

“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”

2.1.2 Misi Kepala Daerah

Visi Pemerintah dan masyarakat Kota Bekasi akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan, sebagaimana dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Ringkasan Visi dan Misi RPJMD Perubahan Kota Bekasi
2018-2023

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan	meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Meningkatkannya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah
	membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai	Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah,	Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
		kreatif dan aksesibel	
	meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif yang berdaya saing	Memperkuat struktur perekonomian kota dengan focus pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya iklim usaha dan investasi
			Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka
			meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif
			meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa
			Meningkatnya daya beli masyarakat
	Meningkatkan dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia dan inovatif	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak mulia	Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi kreatif dan inovasi
			Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang sehat
			Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga
			Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
			Terbangunnya masyarakat yang religious dan berakhlak mulia
	Membangun meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman	Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kehesi social yang kuat
			Terwujudnya upaya kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko bencana
			Terwujudnya daya dukung lingkungan kota yang berkelanjutan

Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 Perubahan, 2021

Dalam upaya mendukung pencapaian visi Pemerintah Kota Bekasi, Sekretariat Daerah Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung pada pelaksanaan misi ke satu yaitu **“Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik”** untuk membangun Kota Bekasi. Secara umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi berkontribusi terhadap seluruh misi dari sisi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum.

2.1.3 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan dan sasaran, dalam RPJMD yang sesuai dengan kedudukan Sekretariat Daerah yang tertuang pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2021 sebagai unsur staf pendukung Wali Kota yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya dimana dalam hal ini berdasarkan rumusan visi dan misi maka tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama 5 tahun adalah : **Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah.**

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan social;

2. Meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

Mengacu pada tujuan yang telah di tetapkan, maka saran yang hendak dicapai dalam turun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2018 – 2023 beserta perubahannya

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Tujuan :							
	Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Nilai AKIP Kota (Lama)	Nilai	64	65,8	-	-	-
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi.	Persen	-	-	100	100	100
	Sasaran :							
	Meningkatnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah (Lama)	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi. (Lama)	Persen	100	100	-	-	-
		Nilai IKM (Pindah Sasaran)	Nilai	79	80	-	-	-
	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan social (Baru)	Persentase Capaian IKK yang meningkat (Tetap)	Persen	38	38	39	39	40
	Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah (Lama)	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" ke atas) (Lama)	Nilai	32	45	-	-	-
	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan (Baru)	Indeks Pelaksanaan Pembangunan (Baru)	Nilai	-	-	84	86	88
		Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi (Baru)	Persen	-	-	100	100	100

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD (Lama)	Persentase BUMD yang sehat (Lama)	Persen	100	100	-	-	-
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP SETDA (Baru)	Nilai	-	-	A	A	A
		Nilai IKM SETDA (Pindah Sasaran)	Nilai	-	-	81	82	83
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas (Kategori A) (Baru)	Persen	-	-	11.36	15.90	22.73

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2018-2023 Perubahan, 2021

Pada tahun 2021 dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan 2018-2023 maka dilakukan perubahan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi dimana perubahan dilakukan pada indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja.

2.1.4 Indikator Kinerja Utama

IKU atau Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses kegiatan dan kriteria indikator kinerja yang baik, sebagai dasar penilaian untuk setiap jabatan yang ada.

Pada penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2018-2023 ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator sasaran yang selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Daerah Kota Bekasi 2018-2023, namun pada perjalanannya dilakukan penyesuaian pada indikator sasaran Sekretariat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2018-2023 Perubahan.

Pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2018-2023 Perubahan ini ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator sasaran yang selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Daerah Kota Bekasi 2018-2023 dengan Wali Kota Bekasi dalam rangka mendukung pencapaian IKU Wali Kota yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Adapun target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah menurut Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Perubahan beserta rumus perhitungan dapat disajikan ke dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bekasi

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	PENJELASAN/ RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1.	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial	Persentase Capaian IKK yang meningkat	Untuk mengetahui jumlah IKK yang meningkat	(Capaian IKK yang meningkat / Seluruh Jumlah IKK) x 100%	Persen	40
2.	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi	Untuk mengukur Kinerja Pengawasan BUMD	(Jumlah BUMD yang dibina dan diawasi / jumlah BUMD) x 100%	Persen	100
		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Untuk mengukur Kinerja Pengendalian Pembangunan dan Kinerja Layanan Pengadaan	(Realisasi Pelaksanaan Kegiatan x 80%) + {(Jumlah Pengadaan sesuai ketentuan/ Jumlah pengadaan yang difasilitasi)x40%}+(Indeks kepuasan masyarakat bagian PBJx60%)]x20%	Persen	88
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai IKM SETDA	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	83

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	PENJELASAN/RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
			aparatur penyelenggara pelayanan publik			
		Nilai AKIP SETDA	Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik	hasil Evaluasi Inspektorat Kota Bekasi atas Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi	Nilai	A
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	Pengukur dan meningkatkan kinerja instansi, sebagai dasar penilaian untuk memberikan reward maupun punishment, dan menghindarkan praktik KKN dalam pengelolaan manajemen instansi pemerintahan	(Jumlah perangkat daerah yang menerapkan SAKIP berkualitas A / Jumlah perangkat daerah) x 100%	Persen	22.73

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2018-2023 Perubahan, 2021

2.1.5 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik

harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Sasaran strategis, program dan kegiatan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 4
Strategi, Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi
				Pelaksanaan Otonomi Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
2	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Program Administasi Umum	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pengadaan Mebel
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pemeliharaan Mebel
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
			Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
				Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2018-2023 Perubahan, 2021

2.2 Perjanjian Kinerja

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 Perubahan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang

Penetapan Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Sebagai Berikut:

Tabel 2. 5
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial	Persentase Capaian IKK yang meningkat	Persen	40	Triwulan I	40
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	-
2	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Persen	88	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	88
	Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi	Persen	100	Triwulan I	-	
				Triwulan II	-	
				Triwulan III	-	
				Triwulan IV	100	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP SETDA	Nilai	A	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	-
		Nilai IKM SETDA	Angka	83	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	83
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	Persen	22.73	Triwulan I	-
					Triwulan II	22.73
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	-

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II.a) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (*cascading*) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Pada penetapan APBD Kota Bekasi

Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Bekasi mendapat dukungan anggaran sebesar Rp.217.126.661.696,00 yang digunakan untuk melaksanakan 19 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan yang terangkum dalam 3 program untuk kemudian terkoreksi pada APBD-P menjadi sebesar Rp.238.486.439.083,00 untuk melaksanakan 19 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran per triwulan sebagai berikut:

Tabel 2. 6
Alokasi Anggaran Per Triwulan (APBD-P TA 2023)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	TRIWULAN	TARGET
1	Program Administrasi Umum	177.178.624.231,00	Triwulan I	27.086.086.799
			Triwulan II	45.055.896.370
			Triwulan III	48.295.796.148
			Triwulan IV	56.740.844.914
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	53.539.716.852,00	Triwulan I	13.918.388.200
			Triwulan II	14.244.388.500
			Triwulan III	13.419.786.000
			Triwulan IV	10.857.154.152
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	7.768.098.000,00	Triwulan I	1.581.154.600
			Triwulan II	2.908.697.175
			Triwulan III	2.968.772.775
			Triwulan IV	1.409.473.450

2.3 Rincian Anggaran Tahun 2023

Sedangkan rincian anggaran per kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2. 7
Anggaran Per Sub Kegiatan (Perubahan)

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	177.178.624.231,00
4.01 . 4.01.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00
4.01 . 4.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.466.301.840,00
4.01 . 4.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.416.301.840,00
4.01 . 4.01.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	50.000.000,00
4.01 . 4.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	175.000.000,00
4.01 . 4.01.01.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	175.000.000,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)
4.01 . 4.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	450.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	450.000.000,00
4.01 . 4.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.388.755.500,00
4.01 . 4.01.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	205.957.500,00
4.01 . 4.01.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.882.500.000,00
4.01 . 4.01.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	498.500.000,00
4.01 . 4.01.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	500.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.101.798.000,00
4.01 . 4.01.01.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.511.857.866,00
4.01 . 4.01.01.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.685.357.866,00
4.01 . 4.01.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	21.090.500.000,00
4.01 . 4.01.01.01.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.736.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.790.814.025,00
4.01 . 4.01.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.880.759.800,00
4.01 . 4.01.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.200.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.705.054.225,00
4.01 . 4.01.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.475.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.400.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.500.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	300.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.900.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.375.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.15	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.491.657.000,00
4.01 . 4.01.01.01.15.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	648.649.000,00
4.01 . 4.01.01.01.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.15.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.668.008.000,00
4.01 . 4.01.01.01.16	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.967.220.000,00
4.01 . 4.01.01.01.16.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.005.100.000,00
4.01 . 4.01.01.01.16.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	249.120.000,00

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)
4.01 . 4.01.01.01.16.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.713.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.17	Penataan Organisasi	813.402.000,00
4.01 . 4.01.01.01.17.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	263.402.000,00
4.01 . 4.01.01.01.17.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	250.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.17.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.17.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	200.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.18	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6.548.616.000,00
4.01 . 4.01.01.01.18.01	Fasilitasi Keprotokolan	618.616.000,00
4.01 . 4.01.01.01.18.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.930.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.18.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4.000.000.000,00
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	53.539.716.852,00
4.01 . 4.01.01.01.19	Administrasi Tata Pemerintahan	18.920.480.996,00
4.01 . 4.01.01.07.19.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	4.436.683.796,00
4.01 . 4.01.01.07.19.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	13.888.957.200,00
4.01 . 4.01.01.07.19.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	594.840.000,00
4.01 . 4.01.01.01.20	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	32.329.235.856,00
4.01 . 4.01.01.01.20.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.500.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.20.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	8.118.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.20.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	17.711.235.856,00
4.01 . 4.01.01.01.21	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.190.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.21.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	750.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.21.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	368.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.21.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	72.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.22	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.100.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.22.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.000.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.22.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	100.000.000,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	7.768.098.000,00
4.01 . 4.01.01.01.23	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.065.920.000,00
4.01 . 4.01.01.01.23.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	575.920.000,00
4.01 . 4.01.01.01.23.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	150.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.23.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	340.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.24	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.927.178.000,00
4.01 . 4.01.01.01.24.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	200.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.24.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4.527.178.000,00
4.01 . 4.01.01.01.24.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	200.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.25	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.775.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.25.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	725.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.25.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	700.000.000,00
4.01 . 4.01.01.01.25.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	350.000.000,00
	TOTAL ANGGARAN	238.486.439.083,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja (PK), dari pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah ditetapkan, sampai pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, memiliki standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan Tahun 2023. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya, sehingga akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk

peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan media formulir pengukuran kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \right) * 100\%$$

Dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Nilai
1.	>91-100	Sangat Memuaskan	AA
2.	>80-90	Memuaskan	A
3.	>70-80	Sangat Baik	BB
4.	>60-70	Baik	B
5.	>50-60	Cukup	CC
6.	>30-50	Kurang	C
7.	>0-30	Sangat Kurang	D

LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi disusun dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKIP ini terlihat rumusan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi pada setiap sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 serta pengukuran pencapaian kinerja setiap indikatornya dengan metode perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target. Hasil pengukuran pencapaian kinerja memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama tahun 2023 dalam mencapai tujuan Sekretariat Daerah yaitu Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah, terutama kaitannya untuk mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang telah dicapai Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama tahun 2023, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2018-2023 Perubahan serta perjanjian kinerja Sekretaris Daerah Kota Bekasi tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang dimana kesemua indikator mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial	Persentase Capaian IKK yang meningkat	Persen	40	50	125%
2.	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Persen	88	89,414	101,61%
		Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi	Persen	100	100	100%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP SETDA	Nilai	A	A	100%
		Nilai IKM SETDA	Indeks	83	87,7	105,66%
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	Persen	22,73	20,45	89,97%

Sumber : Data Evaluasi Internal, Bagian Tata Usaha Setda, 2023

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2018-2023 Perubahan. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran startegis pertama yaitu Meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial Sekretariat Daerah Kota Bekasi menetapkan Persentase Capaian IKK yang meningkat dengan capaian kinerja 125 persen (terlampau).

Untuk mencapai sasaran strategis kedua Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : *pertama* Indeks Pelaksanaan Pembangunan dengan capaian kinerja 101,61 persen (terlampau) dan *kedua* Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi dengan capaian kinerja 100 persen dapat diinterpretasikan tujuan Setda pada ke 2 (dua) indikator ini tercapai.

Untuk mencapai sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja, Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: *Pertama* Nilai AKIP SETDA dengan capaian kinerja 100 persen (tercapai), *kedua* Nilai IKM SETDA dengan capaian kinerja 105,66 persen dan *ketiga* Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas dengan capaian kinerja 89,97 persen hingga dapat diinterpretasikan bahwa dengan tidak tercapainya indikator kinerja ketiga Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas, sasaran strategis setda pada indikator ini belum tercapai.

Dengan melihat 6 (enam) indikator untuk mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dimana kesemua indikator mencapai target yang ditetapkan maka capaian indikator kinerja tersebut semestinya mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan Sekretariat Daerah dalam Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah yang diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi.

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial

1. Indikator Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa capaian kinerja urusan pemerintahan dalam penyusunan LPPD menggunakan IKK Output (Keluaran) dan IKK Outcome (Hasil) yang merupakan gambaran dari keberhasilan

daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian. Adapun evaluasi terhadap LPPD menghasilkan skoring yang berasal dari bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK per bidang urusan pemerintahan.

Pada tahun 2023 pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui kinerja Bagian Tata Pemerintahan dengan perolehan skor LPPD Kota Bekasi sebesar 3,1703 (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023) dari target yang ditetapkan pada RPJMD pada tahun 2023 sebesar 3,360 jika dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya sebesar 1,82 dimana pada EPPD tahun 2022 berdasarkan LPPD 2021 terjadi penurunan skor yang cukup drastis disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya sebagai dampak adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan nilai pada IKK makro sehingga dibutuhkan usaha yang luar biasa untuk mencapai peningkatan nilai yang signifikan.

Untuk meningkatkan skor hasil EPPD harus didukung dengan peningkatan capaian masing-masing IKK, dan diperhitungkan pada target RPJMD untuk memperoleh peningkatan skor diperkirakan harus ada 40 persen capaian IKK meningkat. Adapun Capaian kinerja indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Persentase Capaian IKK yang meningkat

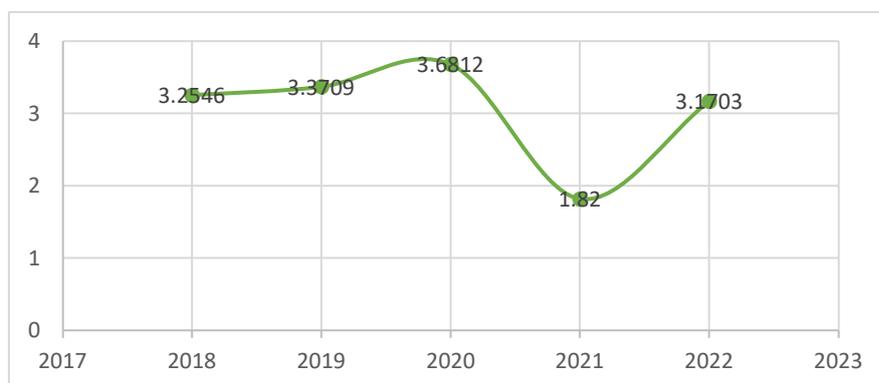
No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
			Target	Realisasi	
1	Persentase Capaian IKK yang meningkat	persen	40	50	125%

Sumber : Data Bagian Tata Pemerintahan tahun 2023, Diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 40 Persen, sementara realisasi mencapai 50 Persen maka capaian kinerja tahun 2023 atas Indikator Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat pada tahun 2023 sebesar 125 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2023 telah terlampaui dengan penjelasan bahwa 62 dari total 127 IKK meningkat dari tahun sebelumnya

Terlampauinya target indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat ini, tentunya akan mendorong kepada peningkatan nilai EPPD tahun 2023 sebagaimana peningkatan nilai yang terjadi pada tahun 2018 sampai dengan 2023 seperti yang tergambarakan pada grafik berikut :

Gambar 3. 1
Grafik Perkembangan Nilai EPPD Kota Bekasi
Tahun 2018-2023



Sumber : Hasil EPPD terhadap LPPD Kota Bekasi tahun 2018-2023 Kemendagri

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi teknis penyusunan sekaligus penyampaian form dan pengisian IKK untuk diisi oleh masing Perangkat Daerah;
- b. Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki data utama seperti Data Keuangan dan Aset dengan BPKAD, data Kepegawaian dengan BKPSDM, dan program perencanaan Pembangunan dengan Bappelitbang, data kependudukan dengan Dispendukcapil agar tidak terjadi kerancuan data saat pengisian Indikator Kinerja Kunci;
- c. Melakukan desk terhadap data IKK pada setiap Perangkat Daerah karena setiap data IKK yang di isikan harus ada data pendukungnya;

Pencapaian indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat pada tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1.	Persentase Peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah	Persen	75	63,63	84,84

Sumber : Data Bagian Tata Pemerintahan tahun 2023, Diolah

Walaupun dari ketercapaian indikator program Persentase Peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah tidak tercapai namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat di tahun 2023 hal ini dikarenakan pemahaman IKK yang dimaksud hanya dihitung dari perangkat daerah yang mengampu IKK sejumlah 28 perangkat daerah saja. Capaian indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat tahun 2023 ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat dengan Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Capaian IKK yang meningkat	
		2023	Target Akhir Renstra
Target	Persen	40	40
Realisasi	Persen	50	50

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2023

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat pada tahun 2023 sebesar 50% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 40%, maka Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah dapat mempertahankan capaian kinerja. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Sekretariat Daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja Persentase Capaian IKK yang meningkat pada perangkat daerah dengan langkah pembinaan secara berkesinambungan dan melakukan penjagaan atas data-data capaian IKK.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan

kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Capaian IKK yang meningkat Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 5
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Sasaran	Program/kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase Capaian IKK yang meningkat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	594.840.000	334.791.540	56,28	125	68,72
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	594.840.000	334.791.540	56,28		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2023, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 594.840.000,00 (*Lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 334.791.540,00 (*tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Capaian IKK yang meningkat hanya mencapai 56,28 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase Capaian IKK sebesar 50 persen dari target sebesar 40 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 125 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 68,72 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi *capaian* kinerja terlampaui.

Tabel 3. 6
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 Untuk untuk Indikator
Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2023	2022
1	Persentase Capaian IKK yang meningkat	Persen	50	46,83

Sumber : Data Bagian Tata Pemerintahan Setda tahun 2023, diolah

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan

2. Indikator Sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan

Indikator sasaran strategis meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan adalah Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang diperoleh dengan formula :

$$\left(\text{Realisasi Pelaksanaan Kegiatan} \times 80\% \right) + \left\{ \left[\left(\frac{\text{Jumlah Pengadaan Sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Pengadaan yang Difasilitasi}} \times 40\% \right) + (\text{Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian PBJ}) \times 60\% \right] \times 20\% \right\}$$

Indikator ini merupakan gabungan persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan, persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa yang memenuhi ketentuan dan indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadaan barang/ jasa yang sesuai dengan ketentuan.

Indikator indeks pelaksanaan pembangunan adalah hasil reviu terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang baru di tetapkan pada dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang langsung diaplikasikan pada tahun 2022.

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7
Analisis Pencapaian Indikator Indeks Pelaksanaan
Pembangunan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
			Target	Realisasi	
1	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	persen	88	89,414	101,61%

Sumber: Data Bagian Pembangunan dan Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada tahun 2023 sebesar 88 persen, sementara realisasi mencapai 89,414 persen, maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang sebesar 101,61 persen, maka capaian indikator Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun 2023 telah terlampaui sebesar 1,414 persen dari target yang telah di tetapkan.

Dalam mengukur kinerja Pelaksanaan Pembangunan di Kota Bekasi, dihitung menggunakan beberapa komponen yaitu :

1. Komponen pembentuk Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang pertama adalah nilai kinerja pengendalian pembangunan diperoleh dari realisasi kinerja fisik perangkat daerah dimana pada tahun 2023 ini kinerja fisik perangkat daerah sebesar 98,25 persen jika dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 85,69 persen. Untuk Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8
Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01	Dinas Pendidikan	1.753.334.180.169	1.753.334.180.169	100,00	1.510.650.009.931	86,16	100,00	99,97	-13,84	-0,03
1.02.01	Dinas Kesehatan	827.266.915.024	827.266.915.024	100,00	733.373.490.370	88,65	100,00	92,01	-11,35	-7,99
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	563.319.390.263	563.319.390.263	100,00	539.999.078.580	95,86	100,00	97,44	-4,14	-2,56
1.03.01	Dinas Tata Ruang	26.029.624.128	26.029.624.128	100,00	22.893.532.000	87,95	100,00	99,20	-12,05	-0,80
1.03.02	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	824.863.252.591	824.863.252.591	100,00	782.000.945.767	94,80	100,00	99,17	-5,20	-0,83
1.04.02	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	587.680.845.034	587.680.845.034	100,00	503.163.023.989	85,62	97,45	97,84	-14,38	0,39
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	92.817.098.905	92.817.098.905	100,00	84.907.857.434	91,48	100,00	100,00	-8,52	0,00
1.05.02	Dinas Pemadam Kebakaran	87.973.737.735	87.973.737.735	100,00	62.498.724.276	71,04	100,00	100,00	-28,96	0,00
1.06.01	Dinas Sosial	32.019.890.719	32.019.890.719	100,00	27.416.231.841	85,62	100,00	100,00	-14,38	0,00
1.06.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.380.482.056	10.380.482.056	100,00	9.631.655.070	92,79	100,00	99,39	-7,21	-0,61
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	17.606.113.459	17.606.113.459	100,00	15.868.060.040	90,13	100,00	100,00	-9,87	0,00
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	17.643.003.815	17.643.003.815	100,00	14.315.377.157	81,14	100,00	100,00	-18,86	0,00
2.03.02	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	23.488.213.249	23.488.213.249	100,00	18.202.140.264	77,49	95,08	98,27	-22,51	3,19
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	520.625.167.627	520.625.167.627	100,00	439.822.930.421	84,48	97,41	100,00	-15,52	2,59

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.06.01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	33.397.510.214	33.397.510.214	100,00	30.446.585.289	91,16	99,85	100,00	-8,84	0,15
2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	35.032.578.170	35.032.578.170	100,00	30.306.942.742	86,51	91,42	89,58	-13,49	-1,85
2.09.01	Dinas Perhubungan	119.152.011.965	119.152.011.965	100,00	105.669.365.697	88,68	99,87	100,00	-11,32	0,13
2.10.04	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	35.414.785.081	35.414.785.081	100,00	32.452.312.365	91,63	98,89	99,97	-8,37	1,08
2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	13.900.511.220	13.900.511.220	100,00	12.010.576.199	86,40	100,00	99,89	-13,60	-0,11
2.12.01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36.594.111.010	36.594.111.010	100,00	31.968.540.926	87,36	100,00	99,94	-12,64	-0,06
2.13.01	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	103.240.552.460	103.240.552.460	100,00	96.921.069.986	93,88	100,00	100,00	-6,12	0,00
2.18.02	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah	17.356.146.185	17.356.146.185	100,00	14.156.670.309	81,57	100,00	99,20	-18,43	-0,80
3.02.03	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	14.945.588.385	14.945.588.385	100,00	13.026.170.814	87,16	100,00	100,00	-12,84	0,00
3.06.02	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	34.130.670.835	34.130.670.835	100,00	29.557.473.434	86,60	100,00	99,55	-13,40	-0,45
4.01.01	Sekretariat Daerah	238.486.439.083	238.486.439.083	100,00	221.051.910.162	92,69	100,00	99,22	-7,31	-0,78
4.02.01	Inspektorat Kota	42.987.716.180	42.987.716.180	100,00	37.794.067.019	87,92	100,00	99,27	-12,08	-0,73
4.03.02	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	34.430.862.820	34.430.862.820	100,00	30.169.405.250	87,62	100,00	100,00	-12,38	0,00
4.04.02	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	235.748.454.499	235.748.454.499	100,00	148.568.988.769	63,02	100,00	97,78	-36,98	-2,22
4.04.03	Badan Pendapatan Daerah	177.637.449.947	177.637.449.947	100,00	148.846.369.879	83,79	100,00	99,95	-16,21	-0,05
4.05.01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.294.184.345	25.294.184.345	100,00	22.227.611.675	87,88	100,00	96,89	-12,12	-3,11

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.08.01	Sekretariat DPRD	184.951.581.620	184.951.581.620	100,00	152.358.854.438	82,38	100,00	95,82	-17,62	-4,18
4.11.01	Kecamatan Bekasi Timur	31.223.788.970	31.223.788.970	100,00	29.863.671.564	95,64	100,00	100,00	-4,36	0,00
4.11.02	Kecamatan Bekasi Barat	32.444.951.190	32.444.951.190	100,00	30.849.214.551	95,08	100,00	99,65	-4,92	-0,35
4.11.03	Kecamatan Bekasi Utara	43.038.265.880	43.038.265.880	100,00	40.933.263.904	95,11	100,00	100,00	-4,89	0,00
4.11.04	Kecamatan Bekasi Selatan	31.621.763.145	31.621.763.145	100,00	30.394.043.219	96,12	100,00	99,96	-3,88	-0,04
4.11.05	Kecamatan Medansatria	26.444.199.990	26.444.199.990	100,00	25.052.390.729	94,74	100,00	99,83	-5,26	-0,17
4.11.06	Kecamatan Rawalumbu	30.587.047.005	30.587.047.005	100,00	28.637.964.069	93,63	100,00	97,80	-6,37	-2,20
4.11.07	Kecamatan Bantargebang	20.860.445.200	20.860.445.200	100,00	19.815.539.713	94,99	100,00	99,31	-5,01	-0,69
4.11.08	Kecamatan Mustikajaya	27.143.133.350	27.143.133.350	100,00	25.753.883.903	94,88	100,00	100,00	-5,12	0,00
4.11.09	Kecamatan Jatisih	34.917.384.180	34.917.384.180	100,00	32.743.695.720	93,77	99,89	100,00	-6,23	0,11
4.11.10	Kecamatan Pondokgede	30.096.380.988	30.096.380.988	100,00	27.511.982.388	91,41	100,00	99,85	-8,59	-0,15
4.11.11	Kecamatan Jatisampurna	25.940.431.385	25.940.431.385	100,00	24.626.451.199	94,93	100,00	100,00	-5,07	0,00
4.11.12	Kecamatan Pondokmelati	24.088.995.600	24.088.995.600	100,00	21.358.734.437	88,67	100,00	96,25	-11,33	-3,75
4.12.01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	85.390.004.473	85.390.004.473	100,00	77.862.899.918	91,19	100,00	96,16	-8,81	-3,84
TOTAL		7.211.545.860.149	7.211.545.860.149	100,00	6.337.679.707.407	87,88	99,54	98,25	-12,12	-1,29

Sumber: Data Simpelbang, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023

2. Komponen yang kedua adalah persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa yang memenuhi ketentuan, dimana dari 16239 paket pekerjaan yang terdaftar di aplikasi SIRUP pada tahun 2023 yang ada di kota Bekasi kesemuanya difasilitasi oleh bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Komponen ketiga yaitu indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadaan barang/ jasa yang sesuai dengan ketentuan, dimana atas dasar survey kepuasan masyarakat yang dilakukan dalam kurun waktu Januari-Desember 2023 nilai yang didapatkan oleh unit layanan Publik PBJ adalah 89,45 atau dengan kategori sangat baik.

Dari ketiga komponen tersebut didapatkan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$(98,25 \times 80\%) + \left\{ \left[\left(\frac{16239}{16239} \times 40\% \right) + (89,45) \times 60\% \right] \times 20\% \right\}$$

sehingga didapatkan hasil sebesar 89,414 persen.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan melakukan kunjungan maupun via media sosial, dimana didalam kegiatan tersebut PPTK di dorong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah direncanakan;
2. Melakukan kegiatan pengendalian fisik konstruksi;
3. Mengoptimalkan koordinasi dan sosialisasi terjadwal dengan perangkat daerah terkait pengisian RUP baik secara langsung maupun secara virtual melalui media sosial. Hal ini dilakukan agar memudahkan perangkat daerah dalam entri data RUP pada SIRUP;

4. Untuk mengatasi hambatan dalam permasalahan adanya perubahan peraturan pengadaan barang/jasa maka pokja melakukan koordinasi secara intensif dengan kementerian dan Lembaga terkait agar memiliki pedoman atau panduan dalam mengambil keputusan terkait proses pengadaan barang/jasa; dan
5. Melakukan koordinasi secara intensif kepada perangkat daerah terkait kelengkapan dokumen pengadaan.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Perekonomian Dan Pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 9
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja
Utama Indeks Pelaksanaan Pembangunan

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1.	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Pembangunan	Persen	100	100	100
2.	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	100	100	100

Sumber: Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023, Diolah

Dengan melihat capaian indikator program rata-rata tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan. Capaian indikator sasaran Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan tahun 2023 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama
Indeks Pelaksanaan Pembangunan Target Akhir Renstra 2018-
2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	
		2023	Target Akhir Renstra
Target	Persen	88	88
Realisasi	Persen	89,414	89,414

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2023

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada tahun 2023 sebesar 89,414 Persen dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 88 persen maka dapat dikatakan target dapat terlampaui. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini bukan berarti tidak ada hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah. Faktor penghambat itu antara lain :

1. Pemahaman Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih minim, sehingga masih terdapat kekeliruan dalam input data SiRUP;
2. OPD tidak konsisten dalam melakukan revisi dokumen pengadaan apabila ada kesalahan atau kurangnya persyaratan dalam dokumen pengadaan sehingga mengakibatkan waktu pemilihan penyedia barang/jasa tidak tepat.
3. Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berimplikasi pada dibutuhkannya waktu untuk penyesuaian kebijakan serta produk hukum daerah di bidang pengadaan barang/jasa;

untuk mempertahankan capaian kinerja indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan Sekretariat Daerah mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi hambatan, diantaranya:

- a. Melakukan evaluasi terhadap indikator program agar seluruh Bagian di Sekretariat Daerah memiliki indikator program yang harus tercapai dan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian agar kinerjanya maksimal;
- b. Melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan per triwulan pada setiap Bagian dan menjadikan hasil evaluasi berkala tersebut menjadi bahan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya;
- c. Adanya aplikasi SIMPELBANG yang mempermudah dalam mengumpulkan dan merekap data realisasi pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengoptimalkan koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait pengisian data RUP baik melalui rapat virtual maupun dengan pendampingan langsung. Hal ini dilakukan agar memudahkan OPD dalam melakukan entri data RUP pada SiRUP;
- e. Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat adanya perubahan peraturan pengadaan barang/jasa maka Pokja melakukan koordinasi secara intensif dengan kementerian terkait agar memiliki pedoman atau panduan dalam mengambil keputusan terkait proses pengadaan barang/jasa;
- f. Melakukan koordinasi secara intensif ke OPD terkait kelengkapan dokumen pengadaan agar segera ditindaklanjuti.
- g. Memperkuat SDM di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Bekasi dengan penambahan Fungsional Pengadaan

Barang/Jasa sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam Analisis Jabatan dan Beban kerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 11
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Program Perencanaan dan Pembangunan	6,702,178,000	6,178,566,845	92,187	101,61	9,423
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.927.178.000	4.754.859.488	96,50%		
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	200.000.000	184.872.518	92,44%		
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4.527.178.000	4.370.650.500	96,54%		
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	200.000.000	199.336.470	99,67%		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.775.000.000	1.423.707.357	80,21%		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	725.000.000	673.237.105	92,86%		
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	700.000.000	495.423.252	70,77%		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	350.000.000	255.047.000	72,87%		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2023, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 6,702,178,000,00 (*Enam milyar tujuh ratus dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 6,178,566,845,00 (*Enam milyar seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang mencapai 101,61 persen.

Jika dikaitkan dengan capaian Indeks Pelaksanaan Pembangunan sebesar 89,414 persen dari target nilai sebesar 88 poin, atau dengan capaian kinerja sebesar 101,61 persen, sementara serapan anggaran hanya sebesar 92,187 Persen, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam penggunaan penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 9,423 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran yang cukup besar, tetapi *capaian* kinerja dapat melampaui target.

Tabel 3. 12
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2022 Dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator
Kinerja Sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2022	2023
1	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Persen	87,03	89,414

Sumber : Data Bagian Tata Usaha, diolah

Capaian indikator kinerja sasaran Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan tahun 2023 sebesar 89,414 mengalami kenaikan sebesar 2,384 poin dari tahun 2022.

3. Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Desentralisasi Fiskal, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan, diantaranya melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, salah satu tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah diantaranya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dan keanekaragaman sumber daya lokal yang dimiliki oleh Wilayah tersebut.

Dengan demikian, pemerintah daerah tentunya dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membangun daerahnya serta memiliki daya saing yang tinggi untuk mengkombinasikan antara faktor kondisi ekonomi, kualitas kelembagaan publik, sumber daya manusia dan teknologi yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk lebih berkembang dan berdaya saing.

Semenjak undang-undang tentang otonomi daerah tersebut diterapkan, persoalan kemampuan daerah secara ekonomi dan politik mulai menjadi sorotan. Salah satu isu ekonomi yang menarik adalah seputar daya dukung sumber pendapatan daerah dalam menggantikan penerimaan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Isu ini memang strategis mengingat pelaksanaan otonomi juga dapat diartikan sebagai

kemandirian daerah dari sisi pembiayaan pembangunan. Upaya yang giat dilakukan dalam rangka pengembangan daerah agar dapat mandiri adalah dengan pendirian BUMD sebagai

Dalam upaya untuk menggali potensi guna memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, pemerintah Kota Bekasi telah memiliki beberapa BUMD diantaranya adalah Perumda Air Minum Tirta Patriot, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi, PT. Sinergi Patriot (perseroda), PD Mitra Patriot (perseroda), PD Minyak dan Gas Bumi (perseroda) dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot (perseroda), dimana tujuan penting BUMD tersebut adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemegang saham utama berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan kinerja BUMD melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan termasuk menilai tingkat kesehatan BUMD, Evaluasi kinerja didasarkan pada Modul Penilaian Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2017. Modul tersebut merupakan landasan evaluasi kinerja terbaru yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan modul tersebut, maka logika evaluasi kinerja dibangun berdasarkan model balanced scorecard (BSC) dimana terdapat empat perspektif di dalamnya yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran (learning and growth). Atas dasar logika balanced scorecard (BSC) tersebut, selanjutnya aspek yang dilakukan penilaian adalah aspek

keuangan (rasio-rasio keuangan), aspek operasional (perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran), dan aspek administrative (pelaporan keuangan dan perencanaan perusahaan).

Tingkat Kesehatan BUMD ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja BUMD untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian:

1. Aspek Keuangan diambil berdasarkan indikator dalam perspektif keuangan;
2. Aspek Operasional diambil berdasarkan indikator dalam perspektif pelanggan, bisnis proses, serta learning and growth; dan
3. Aspek Administrasi.

Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan terhadap ketiga aspek tersebut Didapatkan hasil sebagaimana berikut:

Tabel 3. 13
Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD di Kota Bekasi

No	BUMD	Predikat	Kategori
1	PDAM Tirta Bhagasasi	Sehat	A
2	PDAM Tirta Patriot	Kurang Sehat	BBB
3	PT. (Perseroda) Sinergi Patriot	Kurang Sehat	BBB
4	PT. (Perseroda) BPRS Syariah Patriot	Sehat	AA
5	PD Migas Kota Bekasi	Tidak Sehat	B
6	PD Mitra Patriot Bekasi	Kurang Sehat	BBB

Sumber : Laporan Evaluasi BUMD tahun 2023, Bagian Perekonomian

Dengan demikian pada tahun 2023 sebanyak 6 BUMD dari 6 BUMD di Kota Bekasi mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sehingga dapat diambil kesimpulan capaian indikator Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 3. 14
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase
BUMD yang Dibina dan Diawasi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
			Target	Realisasi	
1	Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi	persen	100	100	100

Sumber: Bagian Perekonomian tahun 2023

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 100 Persen BUMD yang dibina dan diawasi, sementara realisasi tercapai 100 Persen maka capaian kinerja tahun 2023 atas Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi 100 persen, maka capaian Persentase BUMD dalam kondisi sehat pada Tahun 2023 berhasil mencapai target target.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2023 karena bagian perekonomian Sekretariat Daerah melaksanakan:

1. memberikan arahan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD;
2. menyusun pedoman pelaksanaan operasional BUMD;
3. menetapkan persyaratan pengangkatan Direksi, Badan Pengawas dan Komisaris;
4. mengadakan pertemuan secara periodik dengan Pengurus BUMD (Direksi, Badan Pengawas, Komisaris) dan pejabat yang berwenang;
5. penataan strategi usaha agar dapat berkembang dan berjalan dengan baik;
6. Pengawasan dan Pengendalian dalam bentuk penyusunan petunjuk teknis pembinaan BUMD dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional BUMD.

Secara makro, peranan BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat. Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun, hingga saat ini tujuan tersebut belum secara nyata diwujudkan oleh BUMD. Kontribusi BUMD dalam menghasilkan PAD masih sangat minim sehingga tantangan yang dihadapi sekretariat daerah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan antara lain :

- a. Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi BUMD baik masalah internal berkaitan dengan manajemen perusahaan ataupun masalah eksternal berkaitan dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi dan perubahan lingkungan usaha yang menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup perusahaan.
- b. Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi berupa pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif kepada BUMD PT Sinergi Patriot Kota Bekasi (Perseroda) dan PT Mitra Patriot Kota Bekasi karena tingkat kesehatan masuk dalam kategori Kurang Sehat, serta kepada PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi (Perseroda) yang masuk dalam kategori Tidak Sehat melalui pembentukan tim penyehatan dan/atau

penyelamatan BUMD yang beranggotakan inklusif dari berbagai unsur untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi;

- c. Perlu adanya regulasi turunan dari regulasi yang sudah ditetapkan oleh kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Pusat yang mengatur BUMD secara teknis dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan di Kota Bekasi untuk mendukung peningkatan kinerja BUMD Kota Bekasi yang berdaya saing dan memudahkan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.
- d. Perlu adanya pengembangan pedoman atau standar tata kelola yang harus diikuti oleh semua BUMD. Dalam hal ini diperlukan pengaturan mengenai perlunya disusun *code of conduct* dan sekaligus kode etik perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah aspek struktur manajemen, tata kelola perusahaan, pengelolaan benturan kepentingan, dan etika bisnis.
- e. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Kota Bekasi yang memuat panduan *Key Performance Indicator (KPI)* BUMD, format laporan periodik operasional BUMD, format laporan pertanggungjawaban manajemen BUMD, format RUPS Anggaran, format RUPS Tahunan, Tata Cara Penilaian Kinerja, Monitoring dan evaluasi kinerja BUMD, Tindak Lanjut hasil evaluasi penilaian kinerja dan *timeline* atau penentuan periodic waktu pelaksanaan kegiatan bagia seluruh BUMD.
- f. Perlu adanya kontrak manajemen dari seluruh pengurus BUMD di awal jabatan dan/atau setiap awal tahun anggaran baru, dan/atau pada sisa jabatan pengurus yang telah menjabat

mengenai komitmen pencapaian target perusahaan atau KPI dan reward & punishment sebagai bagian monitoring dan evaluasi periodik oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

- g. mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM BUMD melalui program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur dan sistematis. Pengembangan dan pelatihan SDM BUMD adalah investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan daya saing, kinerja, dan kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah. Pemerintah perlu memfasilitasi kerja sama antara BUMD dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk menyediakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan BUMD. Pada era terkini, Pemerintah dapat memberikan pengakuan resmi terhadap sertifikasi atau kompetensi yang diperoleh melalui program pelatihan. Hal ini dapat meningkatkan nilai kompetensi SDM BUMD di pasar kerja.
- h. Perlu adanya dashboard BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang didalamnya memuat capaian kinerja BUMD yang real time/ update secara periodic baik bulanan, triwulanan dan tahunan yang terhubung dengan system informasi di masing-masing BUMD sebagai bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi BUMD.
- i. Perlu adanya *re-mapping* proses bisnis dari masing-masing BUMD yang tertuang dalam *business model canvas* sebagai dasar meningkatkan kinerja BUMD Kota Bekasi.
- j. Perlu adanya panduan bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi atas rencana strategis bisnis pengembangan BUMD jangka menengah dan jangka Panjang dalam bentuk *blueprint masterplan* yang akan menjadi acuan bagi seluruh BUMD

untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan bisnis yang berdaya saing.

Sehingga untuk meningkatkan capaian kinerja perlu diambil langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh Sekretariat Daerah antara lain :

- a. Restrukturisasi dan optimalisasi BUMD;
- b. Penguatan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis;
- c. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan BUMD;
- d. Ekspansi dan Diversifikasi Usaha;
- e. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
- f. Perluasan sumber-sumber permodalan/pembiayaan BUMD
- g. Evaluasi dan monitor serta bimbingan (couching) kesemua BUMD secara rutin oleh Pembina BUMD yang dilakukan minimal setahun dua kali, untuk memastikan bahwa Good Corporate Governance (GCG) dalam sistem tata kelola manajemen perusahaan dijalankan dengan baik sehingga menghasilkan Kinerja Unggul (Performance Excellence);
- h. Melakukan penilaian tingkat kesehatan keuangan dan non keuangan BUMD dalam hubungannya dengan kemampuan dalam menjalankan usahanya dan kontribusi terhadap PHD;
- i. Menghitung rasio tingkat pengembalian modal atas investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada BUMD baik secara finansial maupun secara sosial;
- j. Mengidentifikasi dan menyusun kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.

Tabel 3. 15
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2022/23	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1.	Jumlah Bidang Usaha BUMD	Jumlah Bidang Usaha	5	100%	100%
2.	Persentase Peningkatan Deviden BUMD	Persen	3	0.000739309%	0.025%

Sumber: Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023, Diolah

Dengan melihat capaian indikator program pendukung indikator sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi pertama jumlah bidang usaha BUMD yang tercapai 100 persen dari target dimana pada tahun 2023 terdapat target 5 bidang usaha BUMD. Target indikator program yang kedua adalah persentase peningkatan deviden BUMD yang dalam hal ini dari target meningkat sebesar 2,25 persen tidak tercapai hanya tercapai 0.000739309 persen dimana ketidak tercapaian target tersebut disebabkan oleh PDAM Tirta Bhagasasi yang tidak mampu memenuhi target Deviden yang telah di tentukan dalam APBD TA 2023, hal ini dikeranakan adanya proses pemisahan aset dan layanan PDAM Tirta Bhagasasi yang ada di wilayah Kota Bekasi. dimana di salah satu klausul kesepakatan terdapat Kewajiban hutang piutang Deviden antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PDAM Tirta Bhagasasi, dan akan diselesaikan dalam tahapan proses tersebut. Walaupun indikator program tidak tercapai namun hal ini tidak memberikan dampak langsung pada tingkat ketercapaian indikator Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi. Adapun capaian indikator Persentase BUMD yang Dibina dan

Diawasi tahun 2023 dikaitkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 16
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi Target Akhir
Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase BUMD dalam kondisi sehat	
		2023	Target Akhir Renstra
Target	Persen	100	100
Realisasi	Persen	100	100

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2023

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat pada tahun 2023 tercapai 100 persen jika dibandingkan dengan target akhir renstra yang juga sebesar 100 persen, maka kedepan Sekretariat Daerah Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 17
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi	Program Perekonomian Dan Pembangunan	575,920,000	349,994,388	60,77	100	35,38
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	575,920,000	349,994,388	60,77		

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
		BUMD dan BLUD					

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2023, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 1 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi, dimana pagu anggaran dianggarkan sebesar Rp. 575,920,000,00 (*lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran Rp. 349,994,388,00 (*Tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*) atau sebesar 60,77% Jika dikaitkan dengan capaian BUMD yang Dibina dan Diawasi mencapai 100 persen dari target sebesar 100 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, maka dapat dianggap berhasil.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 18
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 Dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2022	2023
1	Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi	Persen	100	100

Sumber : Data Bagian Perekonomian Setda tahun 2023, diolah

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

4. Indikator Sasaran Nilai AKIP SETDA.

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja untuk mencapai Misi I RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, karena nilai akuntabilitas instansi pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented goverment). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu entry point utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.

Evaluasi AKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam

rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai mana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Evaluasi AKIP dilakukan dengan tujuan:

- a. Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
- b. Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- c. Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bekasi menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Bekasi memperoleh nilai 81,85 atau predikat “A” dengan intrepretasi Memuaskan. Tabel hasil evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2023 di tunjukan dalam table berikut:

Tabel 3. 19
Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Tahun 2023	
		Bobot (%)	Nilai (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	24,01
2	Pengkuran Kinerja	30	24,19
3	Pelaporan Kinerja	15	12,06
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,16
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81,85
	Tingkat Akuntabilitas		A

Sumber : LHE SAKIP Sekretariat Daerah, Tahun 2023

Adapun capaian indikator Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "A" Ke atas) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 20
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP SETDA

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
			Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP SETDA	Nilai	A	A	100%

Sumber : LHE SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2023, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar nilai A, sementara realisasi mencapai nilai A maka capaian kinerja tahun 2023 atas Nilai AKIP SETDA sebesar 100 persen, maka capaian Nilai AKIP SETDA pada Tahun 2023 telah tercapai.

Adapun perbandingan perolehan Nilai AKIP Perangkat Daerah se-Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 21
Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi

No	Perangkat Daerah	Hasil	
		Nilai	Tingkat Akuntabilitas
1	RSUD	84,56	A
2	DPMPTSP	84,57	A
3	INSPEKTORAT	84,40	A
4	BPKAD	81,43	A
5	BAPPELITBANGDA	82,16	A
6	DINKES	80,70	A
7	SETDA	81,85	A
8	BKPPD	80,48	A
9	DISTARU	72,83	BB
10	SATPOL PP	70,43	BB
11	DISDUKCAPIL	80,97	A

No	Perangkat Daerah	Hasil	
		Nilai	Tingkat Akuntabilitas
12	DBMSDA	79,92	BB
13	DISPERKIMTAN	57,19	CC
14	DISARPUSDA	55,38	CC
15	BAPENDA	79,10	BB
16	DISHUB	78,41	BB
17	DINAS LH	78,14	BB
18	KEC.JATIASIH	56,55	CC
19	DINSOS	77,26	BB
20	DISDIK	60,06	B
21	DISKOMINFOSTANDI	79,04	BB
22	KEC. BEKASI SELATAN	75,07	BB
23	KEC.MEDANSATRIA	77,39	BB
24	DISKOPUKM	76,01	BB
25	DP3A	76,99	BB
26	KEC.JATISAMPURNA	75,57	BB
27	KEC. RAWALUMBU	75,95	BB
28	KEC.PONDOKGEDE	75,52	BB
29	DISPARBUD	67,78	B
30	KEC. PONDOKMELATI	75,14	BB
31	DISPORA	75,35	BB
32	KEC.MUSTIKAJAYA	68,81	B
33	DPPKB	72,06	BB
34	BADAN KESBANGPOL	75,14	BB
35	DINAS DAMKAR	77,11	BB
36	KEC. BEKASI UTARA	72,75	BB
37	KEC.BEKASI TIMUR	75,09	BB
38	KEC. BEKASI BARAT	63,41	B
39	DKPPP	78,14	BB
40	KEC.BANTARGEBAWANG	74,50	BB
41	DISDAGPERIN	78,84	BB
42	SETWAN	63,38	B
43	DISNAKER	51,68	CC
44	BPBD	60,06	B

Sumber : Data LHE Inspektorat Terhadap SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023, diolah

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Nilai AKIP SETDA ini dikarenakan Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan crosscutting kinerja Untuk memastikan kolaborasi kinerja antara Sekretariat Daerah dengan perangkat-perangkat daerah terkait.
- b. Menyempurnakan Proses Bisnis sebagai dasar memperbaiki cascade kinerja mulai organisasi hingga individu;
- c. Menyempurnakan Indikator Kinerja Individu serta sistem pengukuran kinerja individu;
- d. Memanfaatkan integrasi sistem Perencanaan Kinerja , Penganggaran dan Sistem Informasi Kinerja (e-performance based budgeting);
- e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Pembangunan Daerah, Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien;
- f. Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Nilai AKIP SETDA sehingga dapat mencapai target karena didukung oleh indikator capaian program sebagai berikut:

Tabel 3. 22
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Nilai AKIP SETDA

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1.	Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	Persen	75	90,91	121,21

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
2.	Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persen	100	100	100
3.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	Persen	100	100	100

Sumber: Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023, Diolah

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Nilai AKIP SETDA didukung oleh 3 (tiga) indikator program dengan rata-rata capaian program sebesar 107,07 persen maka keberhasilan ini maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Nilai AKIP SETDA. Capaian indikator sasaran Nilai AKIP SETDA jika dikaitkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 23
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP SETDA terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai AKIP SETDA	
		2023	Target Akhir Renstra
Target	Persen	A	A
Realisasi	Persen	100	100

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2023

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Nilai AKIP SETDA pada tahun 2023 sudah tercapai sebesar 100 persen jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu nilai A, maka kedepan Sekretariat Daerah Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menetapkan target kinerja yang sepenuhnya didasarkan atas basis data yang memadai dan dilengkapi dengan argument dan perhitungan logis
2. Menyusun strategi untuk pencapaian kinerja yang telah di tetapkan agar pencapaian kinerja dapat meningkat.
3. Memanfaatkan rencana aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah di perjanjikan;
4. Meningkatkan kualitas evaluasi internal, baik pada setiap level dengan melakukan evaluasi berkala setiap triwulan terkait capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan rencana aksi.
5. Dimanfaatkannya informasi dalam laporan kinerja sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja serta penyesuaian anggaran.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja sasaran Nilai AKIP SETDA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 24
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Nilai AKIP SETDA	Program Administrasi Umum	963,402,000.00	780,257,245.00	80.99	100	11,25
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	200,000,000.00	150,422,758.00	75.21		
		Penyusunan Dokumen	100,000,000.00	92,606,500.00	92.61		

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
		Perencanaan Perangkat Daerah					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	50,000,000.00	47,490,000.00	94.98		
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	263,402,000.00	202,641,866.00	76.93		
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	250,000,000.00	220,441,291.00	88.18		
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100,000,000.00	66,654,830.00	66.65		
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	4,927,178,000.00	4,754,859,488.00	96.50		
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	200,000,000.00	184,872,518.00	92.44		
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4,527,178,000.00	4,370,650,500.00	96.54		
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	200,000,000.00	199,336,470.00	99.67		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2023, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 program dan 9 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai AKIP SETDA, dimana pagu anggaran sebesar Rp.5,890,580,000.00 (*lima milyar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.5,535,116,733.00 (*lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua seratus enam belas rubu tujuh ratus tiga puluh tiga Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai AKIP SETDA mencapai 88,75 persen.

Jika dikaitkan dengan capaian Nilai AKIP SETDA yaitu nilai A dari target nilai A, atau dengan capaian kinerja sebesar 100

persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,25 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi *capaian* kinerja terlampaui dan ini dapat juga diartikan bahwa Sekretariat Daerah dapat meningkatkan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 3. 25
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 Untuk untuk Indikator
Kinerja Sasaran Nilai AKIP SETDA

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2022	2023
1	Nilai AKIP SETDA	Nilai	A	A

Sumber : Data LHE Inspektorat Terhadap SAKIP Sekretariat Daerah tahun 2023, Diolah

5. Indikator Sasaran Nilai IKM SETDA

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan upaya dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat

masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan Masukan yang diukur terhadap 12 (dua belas) unit layanan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Nilai IKM SETDA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 26
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai IKM SETDA

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	83	87,70	105,65%

Sumber: SKM Sekretariat Daerah Kota Bekasi Semester II Tahun 2023, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target Nilai IKM SETDA pada tahun 2023 sebesar 83 poin, sementara realisasi mencapai 87,70 poin, maka capaian kinerja tahun 2023 atas

indikator Nilai IKM SETDA yang sebesar 105,65 persen, maka capaian indikator Nilai IKM SETDA pada Tahun 2023 telah terlampaui.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di Kota Bekasi, digunakan indikator Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM baik. Pada Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Tahun 2023 terhadap 12 Unit layanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah, sebanyak 16 Unsur pelayanan (51,61%) mempunyai nilai IKM baik dan 15 Unsur pelayanan (48,39%) mempunyai nilai SKM Sangat baik. Untuk melihat nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi semester II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 27
Hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Semester II pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2023

No	Unsur Pelayanan	Nilai Ikm	Mutu Pelayanan
1	Pelayanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Acara	100	Sangat Baik
2	Pelayanan Penyediaan Makanan dan Minuman	98.275	Sangat Baik
3	Pelayanan Legal Drafting Produk Hukum Daerah	98.175	Sangat Baik
4	Pelayanan Penomoran Produk Hukum Daerah	97.6	Sangat Baik
5	Pelayanan Bantuan Hukum	97.225	Sangat Baik
6	Pelayanan Evaluasi Naskah Kerjasama	95.05	Sangat Baik
7	Pelayanan Administrasi dan Fasilitasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	94.89	Sangat Baik
8	Pelayanan Fasilitasi Kunjungan Daerah Ke Pemerintahan Kota Bekasi	91.225	Sangat Baik
9	Pelayanan Peminjaman Ruang Aula	91.149	Sangat Baik
10	Pelayanan Pemberian Pendapat Hukum	90.825	Sangat Baik
11	Pelayanan Pendaftaran Calon Penyedia	89.45	Sangat Baik
12	Pelayanan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	89.125	Sangat Baik
13	Pelayanan Desk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	89.025	Sangat Baik
14	Pelayanan Fasilitasi Penyusunan Naskah Kerjasama	88.6	Sangat Baik

No	Unsur Pelayanan	Nilai Ikm	Mutu Pelayanan
15	Pelayanan Penyusunan Standar Pelayanan	88.524	Sangat Baik
16	Pelayanan Rencana Kerjasama	88.1	Baik
17	Pelayanan Asistensi RKA satuan Kerja Yang Berhubungan Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	86.1	Baik
18	Pelayanan Penomoran Surat	85.775	Baik
19	Pelayanan Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	85.15	Baik
20	Pelayanan Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	85.15	Baik
21	Pelayanan Surat Masuk	84.425	Baik
22	Pelayanan Peningkatan Kinerja dan RB	84.39	Baik
23	Pelayanan Rekomendasi Penerima Hibah Di Kota Bekasi	84.25	Baik
24	Pelayanan Evaluasi Kelembagaan	83.8	Baik
25	Pelayanan Penyerahan Piala Kepala Daerah	83.65	Baik
26	Pelayanan Pendirian Rumah Ibadat Di Kota Bekasi	83.325	Baik
27	Pelayanan Keprotokolan	83.175	Baik
28	Pelayanan Desk SAKIP	83.025	Baik
29	Pelayanan Penyusunan Standar Biaya Umum	81.95	Baik
30	Pelayanan Permohonan Informasi Publik Ke Pemkot Bekasi	78.25	Baik
31	Pelayanan Pemeliharaan Gedung Kantor	78.25	Baik
Nilai Rata-rata Capaian SKM Sekretariat Daerah Kota Bekasi		88.20	Baik

Sumber : SKM Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Semester II

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dapat dilihat melalui grafik berikut :

Gambar 3. 2
Grafik Perkembangan Nilai SKM Sekretariat Daerah



Sumber : Laporan SKM Sekretariat Daerah tahun 2020-2023, Diolah

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya perubahan pola pikir (*mindset*) dari petugas pelayanan dari dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat) dengan sebaik-baiknya dan menghilangkan sikap arogansi;
2. Adanya komitmen dari setiap unit layanan;
3. Asistensi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat juga difasilitasi melalui Grup Whatsapp. Dengan adanya Grup Whatsapp, seluruh peserta mendapat arahan teknis tentang pelaksanaan survey dengan lebih cepat serta progress yang dicapai sesuai tahapan survey dapat dipantau oleh Bagian Organisasi;

4. Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara berkala dan intensif oleh Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi;
5. Evaluasi secara berkala terhadap hasil survey kepuasan masyarakat;
6. Adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan publik.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Nilai IKM SETDA pada Sekretariat Daerah, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 28
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Utama Nilai IKM SETDA

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1.	Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persen	100	100	100
2.	Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	Persen	100	100	100
4.	Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	Persen	100	100	100
5.	Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan, hari besar Nasional dan hari besar lainnya	Persen	100	100	100
6.	Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	100	100	100

Sumber: Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023, Diolah

Dengan melihat tingkat capaian indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Nilai IKM SETDA. Capaian indikator sasaran Nilai IKM SETDA

tahun 2023 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 29
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai IKM SETDA Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai IKM	
		2023	Target Akhir Renstra
Target	Nilai	83	83
Realisasi	Nilai	87,70	87,70

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2023

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Nilai IKM SETDA pada tahun 2023 sebesar 87,70 poin dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 sebesar 83,00 poin, maka Sekretariat Daerah Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Sekretariat Daerah untuk mempertahankan capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya:

- a. Melakukan evaluasi terhadap indikator program agar seluruh Bagian di Sekretariat Daerah memiliki indikator program yang harus tercapai dan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian agar kinerjanya maksimal.
- b. Melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan per triwulan pada setiap Bagian dan menjadikan hasil evaluasi berkala tersebut menjadi bahan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya.
- c. Melakukan embahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui ForumKonsultasi Publik (FKP) bersama

perwakilan pengguna layanan untuk kemudian dilakukan penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

- d. Melakukan pembinaan terhadap aparatur pelayanan tentang perubahan *mindset* (pola pikir) dari petugas pelayanan yang dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat).
- e. Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkala dan intensif dengan berkoordinasi dan konsultasi dengan Bagian Organisasi dan memperbaiki layanan dimulai dengan indeks layanan terendah.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai IKM SETDA Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 30
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Nilai IKM SETDA		38,894,235,856	36,451,957,409	93.72	105,65	11,93
		Program Administrasi Umum	4,350,000,000	4,052,067,561	93.15		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,000,000	92,606,500	92.61%		
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	250,000,000	220,441,291	88.18%		
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4,000,000,000	3,739,019,770	93.48%		
		Program Pemerintahan Dan	32,769,235,856	30,976,182,491	94.53		

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
		Kesejahteraan Masyarakat					
		Fasilitasi Bantuan Hukum	368,000,000	137,885,350	37.47%		
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	72,000,000	68,627,800	95.32%		
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6,500,000,000	5,939,643,341	91.38%		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	8,118,000,000	7,651,526,000	94.25%		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	17,711,235,856	17,178,500,000	96.99%		
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,775,000,000	1,423,707,357	80.21		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	725,000,000	673,237,105	92.86%		
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	700,000,000	495,423,252	70.77%		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	350,000,000	255,047,000	72.87%		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2023, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 program dan 11 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai IKM SETDA, dimana pagu anggaran sebesar Rp.38,894,235,856,00 (*Tiga puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.36,451,957,409,00 (*Tiga puluh enam milyar empat ratus lima pulh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus*

sembilan Rupiah), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai IKM mencapai 93,72 persen.

Jika dikaitkan dengan capaian Nilai IKM sebesar 87,70 poin dari target nilai sebesar 83 poin, atau dengan capaian kinerja sebesar 105,65 persen, sementara serapan anggaran hanya sebesar 93,72 Persen, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam penggunaan penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 11,93 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran yang cukup besar, tetapi *capaian* kinerja dapat melampaui target.

Tabel 3. 31
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 Untuk untuk Indikator Kinerja Nilai IKM SETDA

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2022	2023
1	Nilai IKM Setda	Nilai	86,64	87,70

Sumber : Data hasil SKM Setda tahun 2023, diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja sasaran Nilai IKM SETDA terdapat kenaikan capaian kinerja dari 86,64 pada tahun 2022 menjadi 87,70 pada tahun 2023 atau mengalami kenaikan sebesar 1,06. Indikator kinerja sasaran Nilai IKM SETDA dijadikan indikator kinerja sasaran karena untuk mendongkrak menerapkan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah untuk mencapai kinerja penerapan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3. 32
Perbandingan IKM Setda dengan OPD lain

NO	UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN	NILAI IKM	KINERJA PELAYANAN
1	Sekretariat Daerah	87.7	Baik
2	Sekretariat DPRD	98.29	Sangat Baik
3	Inspektorat Daerah	83.77	Baik
4	Badan Pendapatan Daerah	86.57	Baik

NO	UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN	NILAI IKM	KINERJA PELAYANAN
5	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	86.57	Baik
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	87.07	Baik
7	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	83.65	Baik
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85.00	Baik
9	Dinas Pendidikan	79.33	Baik
10	Dinas Kesehatan	86.59	Baik
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.31	Baik
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	86.26	Baik
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	84.99	Baik
14	Dinas Lingkungan Hidup	83.57	Baik
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	87.68	Baik
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	89.03	Sangat Baik
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	89.48	Sangat Baik
18	Dinas Tenaga Kerja	95.36	Sangat Baik
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	89.69	Sangat Baik
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90.98	Sangat Baik
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	96.63	Sangat Baik
22	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	89.38	Sangat Baik
23	Dinas Tata Ruang	80.55	Baik
24	Dinas Perhubungan	78.72	Baik
25	Dinas Pemadam Kebakaran	90.92	Sangat Baik
26	Dinas Sosial	87.55	Baik
27	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	81.17	Baik
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	83.02	Baik
29	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	89.79	Sangat Baik
30	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid	87.63	Baik
31	Satuan Polisi Pamong Praja	86.79	Baik
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90.9	Sangat Baik
33	Kecamatan Bekasi Barat	84.48	Baik
34	Kecamatan Bekasi Selatan	82.53	Baik
35	Kecamatan Bekasi Utara	83.53	Baik
36	Kecamatan Bekasi Timur	86.69	Baik

NO	UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN	NILAI IKM	KINERJA PELAYANAN
37	Kecamatan Medansatria	84.34	Baik
38	Kecamatan Mustikajaya	87.69	Baik
39	Kecamatan Rawalumbu	84.06	Baik
40	Kecamatan Bantargebang	90.74	Sangat Baik
41	Kecamatan Jatisampurna	85.38	Baik
42	Kecamatan Jatiasih	89.52	Sangat Baik
43	Kecamatan Pondokmelati	95.17	Sangat Baik
44	Kecamatan Pondokgede	88.7	Sangat Baik
45	RSUD Kelas D Jatisampurna	83.76	Baik
46	RSUD Kelas D Bantargebang	89.02	Sangat Baik
47	RSUD Kelas D Pondokgede	83.08	Baik
48	RSUD Kelas D Teluk Pucung	91.85	Sangat Baik
49	Puskesmas Seroja	89.46	Sangat Baik
50	Puskesmas Kaliabang Tengah	84.44	Baik
51	Puskesmas Teluk Pucung	75.69	Kurang Baik
52	Puskesmas Pejuang	83.69	Baik
53	Puskesmas Kotabaru	84.72	Baik
54	Puskesmas Bintara	85.49	Baik
55	Puskesmas Bintarajaya	83.44	Baik
56	Puskesmas Kranji	85.55	Baik
57	Puskesmas Rawatembaga	87.46	Baik
58	Puskesmas Margamulya	81.3	Baik
59	Puskesmas Margajaya	92.2	Sangat Baik
60	Puskesmas Pekayonjaya	84.02	Baik
61	Puskesmas Jakamulya	87.09	Baik
62	Puskesmas Karangkitri	86.75	Baik
63	Puskesmas Bojong Rawalumbu	86.7	Baik
64	Puskesmas Pengasinan	92.69	Sangat Baik
65	Puskesmas Arenjaya	90.6	Sangat Baik
66	Puskesmas Bekasi Jaya	88.23	Baik
67	Puskesmas Pondokgede	87.37	Baik
68	Puskesmas Jatirahayu	86.16	Baik
69	Puskesmas Jatiwarna	85.26	Baik
70	Puskesmas Jatimakmur	94.6	Sangat Baik
71	Puskesmas Jatibening	84.49	Baik
72	Puskesmas Jatisampurna	95.84	Sangat Baik
73	Puskesmas Jatiasih	85.71	Baik
74	Puskesmas Jatiluhur	84.87	Baik
75	Puskesmas Bantargebang	87.93	Baik

NO	UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN	NILAI IKM	KINERJA PELAYANAN
76	Puskesmas Bojongmenteng	90.87	Sangat Baik
77	Puskesmas Durenjaya	85.38	Baik
78	Puskesmas Mustikajaya	91.07	Sangat Baik
79	Puskesmas Harapan Baru	86.17	Baik
80	Puskesmas Padurenan	87.58	Baik
81	Puskesmas Perwira	92.84	Sangat Baik
82	Puskesmas Jatiranggon	89.84	Sangat Baik
83	Puskesmas Cimuning	80	Baik
84	Puskesmas Kalibaru	86.73	Baik
85	Puskesmas Jakasetia	95.89	Sangat Baik
86	Puskesmas Perumnas II	79.87	Baik
87	Puskesmas Sumurbatu	94.12	Sangat Baik
88	Puskesmas Mustikasari	80.96	Baik
89	Puskesmas Ciketing Udik	81.42	Baik
90	Puskesmas Jatibening Baru	72.68	Kurang Baik
91	Puskesmas Harapan Mulya	83.44	Baik
92	Puskesmas Jatikramat	87.47	Baik
93	Puskesmas Medansatria	85.89	Baik
94	Puskesmas Jatimekar	92.86	Sangat Baik
95	Puskesmas Jatikarya	82.74	Baik
96	Puskesmas Cikiwul	89.15	Sangat Baik
Nilai rata-rata capaian IKM Kota Bekasi		86.84	Baik

6. Indikator Sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas

Indikator Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah untuk mencapai Misi I RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, karena nilai akuntabilitas instansi pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka

terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu entry point utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.

Untuk mencapai indikator Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah Maka Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah melakukan pembinaan terhadap penyusunan dokumen SAKIP perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan.

Adapun capaian indikator Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas diukur dari perbandingan antara perangkat daerah dengan nilai AKIP A dengan nilai AKIP seluruh perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 33
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase
Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
			Target	Realisasi	
1	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	persen	22,73	20,45%	89,97%

Sumber : Bagian Organisasi Tahun 2023, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 22,73 Persen, sementara realisasi hanya mencapai 20,45 Persen maka capaian kinerja tahun 2023 atas Persentase Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas sebesar 89,97 persen, maka capaian Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas pada Tahun 2023 belum tercapai karena pada tahun 2023 hanya sebanyak 9 perangkat daerah di Kota Bekasi yang mendapatkan nilai AKIP A.

Adapun rekapitulasi perbandingan perolehan Nilai AKIP Perangkat Daerah se-Kota Bekasi Tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 34
Rekapitulasi Perbandingan Hasil Evaluasi AKIP

No	Perangkat Daerah	2020		2021		2022		2023	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1	RSUD	88,41	A	84,51	A	84,53	A	84,56	A
2	DPMPSTP	83,63	A	84,47	A	84,60	A	84,57	A
3	INSPEKTORAT	84,18	A	84,32	A	84,36	A	84,40	A
4	BPKAD	85,37	A	84,13	A	84,21	A	81,43	A
5	BAPPELITBANGDA	81,47	A	81,94	A	82,16	A	82,16	A
6	DINKES	80,61	A	80,64	A	80,65	A	80,70	A
7	SETDA	79,65	BB	80,30	A	80,42	A	81,85	A
8	BKPPD	78,52	BB	80,04	A	80,16	A	80,48	A
9	DISTARU	78,58	BB	79,75	BB	80,43	A	72,83	BB
10	SATPOL PP	75,51	BB	79,15	BB	80,07	A	70,43	BB
11	DISDUKCAPIL	78,23	BB	78,69	BB	80,16	A	80,97	A
12	DBMSDA	77,12	BB	79,90	BB	79,93	BB	79,92	BB
13	DISPERKIMTAN	78,42	BB	79,23	BB	79,28	BB	57,19	CC
14	DISARPUSDA	78,10	BB	79,17	BB	79,88	BB	55,38	CC
15	BAPENDA	79,88	BB	78,40	BB	78,46	BB	79,10	BB
16	DISHUB	78,59	BB	78,19	BB	78,26	BB	78,41	BB
17	DINAS LH	76,24	BB	77,87	BB	78,12	BB	78,14	BB

No	Perangkat Daerah	2020		2021		2022		2023	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
18	KEC.JATIASIH	77,2	BB	77,18	BB	77,64	BB	56,55	CC
19	DINSOS	77,10	BB	77,10	BB	77,23	BB	77,26	BB
20	DISDIK	78,12	BB	76,46	BB	76,48	BB	60,06	B
21	DISKOMINFOSTANDI	78,08	BB	76,06	BB	76,12	BB	79,04	BB
22	KEC. BEKASI SELATAN	76,02	BB	76,03	BB	76,42	BB	75,07	BB
23	KEC.MEDANSATRIA	75,69	BB	75,99	BB	77,05	BB	77,39	BB
24	DISKOPUKM	74,84	BB	75,48	BB	75,60	BB	76,01	BB
25	DP3A	74,39	BB	75,37	BB	76,41	BB	76,99	BB
26	KEC.JATISAMPURNA	74,01	BB	74,01	BB	75,42	BB	75,57	BB
27	KEC. RAWALUMBU	73,43	BB	75,36	BB	75,38	BB	75,95	BB
28	KEC.PONDOKGEDE	74,71	BB	75,21	BB	75,43	BB	75,52	BB
29	DISPARBUD	72,28	BB	75,18	BB	75,24	BB	67,78	B
30	KEC. PONDOKMELATI	73,33	BB	75,07	BB	75,09	BB	75,14	BB
31	DISPORA	74,56	BB	75,06	BB	75,24	BB	75,35	BB
32	KEC.MUSTIKAJAYA	75,22	BB	75,03	BB	76,78	BB	68,81	B
33	DPPKB	73,08	BB	74,93	BB	75,01	BB	72,06	BB
34	BADAN KESBANGPOL	76,27	BB	74,81	BB	74,15	BB	75,14	BB
35	DINAS DAMKAR	72,26	BB	74,25	BB	76,13	BB	77,11	BB
36	KEC. BEKASI UTARA	72,51	BB	74,11	BB	72,20	BB	72,75	BB
37	KEC.BEKASI TIMUR	74,81	BB	74,11	BB	74,56	BB	75,09	BB
38	KEC. BEKASI BARAT	72,26	BB	73,36	BB	73,38	BB	63,41	B
39	DKPPP	65,70	BB	73,34	BB	74,68	BB	78,14	BB
40	KEC.BANTARGEBAH	75,55	BB	74,07	BB	74,15	BB	74,50	BB
41	DISDAGPERIN	73,43	BB	71,86	BB	72,25	BB	78,84	BB
42	SETWAN	77,23	BB	69,56	B	70,08	B	63,38	B
43	DISNAKER	77,11	B	62,48	B	64,17	B	51,68	CC
44	BPBD	72,41	BB	42,39	C	51,89	CC	60,06	B

Sumber : Data LHE Inspektorat Terhadap SAKIP Perangkat Daerah tahun 2020-2023, Diolah

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat menunjukkan bahwa secara kuantitas Persentase OPD yang menerapkan SAKIP

berkualitas pada tahun 2023 ini jumlahnya menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 terdapat 11 perangkat daerah yang mendapatkan nilai AKIP A sedangkan pada tahun 2023 terdapat 9 perangkat daerah dengan nilai AKIP A atau menurun sebesar 4,5%.

Untuk meningkatkan capaian kinerja perlu diambil langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh Sekretariat Daerah antara lain:

- a. Pemerintah Kota Bekasi agar menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.
- b. Mereviu dokumen perencanaan, serta melakukan perbaikan atas perumusan indicator kinerja agar lebih dapat menggambarkan kinerja (outcome) yang diharapkan, sesuai level jabatan dan memenuhi kriteria SMART;
- c. Mereviu keselarasan antar kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan;
- d. Merumuskan program prioritas daerah untuk menyelesaikan isi strategis daerah dengan mengoptimalkan kolaborasi antar daerah;
- e. Mereviu peta proses bisnis dengan membangun struktur kinerja yang sesuai dengan pencapaian kinerja yang diharapkan untuk

memastikan kerangka logis pencapaian kinerja telah dijabarkan dengan baik dan setiap pengampu kinerja mendapatkan kinerja yang sesuai;

- f. Melaksanakan reuiu kinerja secara berjenjang pada tingkatan organisasi maupun individu melalui aplikasi kinerja yang telah dibangun agar tercipta budaya kinerja yang solid pada setiap level;
- g. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Pembangunan Daerah, Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien;
- h. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya budaya kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi, penilaian kinerja periodik, serta mekanisme *reward and punishment*;
- i. Mengoptimalkan kolaborasi antar perangkat daerah pengampu akuntabilitas kinerja sehingga pelaksanaan akuntabilitas lebih cepat, tepat dan terarah;
- j. Menjadikan perbaikan implemintasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas sehingga melampaui target karena didukung oleh indikator capaian program pada Program kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif sebagai berikut:

Tabel 3. 35
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1.	Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	Persen	75%	90,91%	121,21%

Sumber: Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023, Diolah

Ketercapaian atas indikator program Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas sebagaimana tabel diatas, dimana capaian kinerja tahun 2023 terlampaui sebesar 121,21 persen. Capaian kinerja program Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah dicapai dengan membandingkan jumlah perangkat daerah yang memiliki pemahaman SAKIP dengan jumlah seluruh perangkat daerah. Ketercapaian ini berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas. Ketercapaian atas indikator Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas ini juga akan mendorong kepada peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seperti yang tergambarakan pada tabel berikut :

Tabel 3. 36
Perkembangan Nilai AKIP Kota Bekasi

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai AKIP Kota Bekasi	63,49	66,28	67,07	65,48	67,10

Sumber : Hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2019-2023 Kemenpan RB

dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam dua tahun terakhir Kota Bekasi terus berupaya untuk meningkatkan nilai AKIP setelah mengalami penurunan pada tahun 2022, kami optimis

bahwa nilai AKIP Kota Bekasi tahun-tahun selanjutnya akan mendapatkan peningkatan dikarenakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mendorong perubahan mindset seluruh level pimpinan Pemda, bahwa: Nilai Evaluasi SAKIP merupakan tanggung jawab seluruh unsur pemerintah daerah, bukan hanya tanggung jawab unit yang menyusun LKIP saja;
2. Dilakukan reviu Cascade Indikator Kinerja Individu dimana dipetakan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab eselon II, III, IV dan Pelaksana, dimana indikator kinerja individu tersebut di sinkronkan dengan sasaran kinerja pegawai dan menjadi ukuran dalam penilaian prestasi kerja pegawai. Dengan demikian setiap individu pegawai memiliki kontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
3. Mereviu peta proses bisnis untuk kemudian melakukan integrasi proses bisnis dengan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah Kota Bekasi sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Pembangunan Daerah, Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien;

5. Pemerintah Kota Bekasi telah mengintegrasikan 6 (enam) Aplikasi kinerja yang terdiri dari SIENCANG (Perencanaan/Bappelitbangda), SIMDA (Keuangan/BPKAD), e-MONEV (Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan/Bappelitbangda), SIMPELBANG (Monev Tepra/ Bagian Pembangunan SETDA), e-SAKIP (SAKIP/ Bagian Tata Pemerintahan SETDA) dan SIKERJA (Kinerja Harian Pegawai/ BKPSDM) dimana keenam aplikasi tersebut akan mempermudah perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi kinerja perangkat daerah dan individu pegawai dalam mencapai indikator RPJMD dan Renstra.
6. Meningkatkan kualitas evaluasi internal, baik pada level Perangkat Daerah, level Inspektorat Daerah hingga Bappelitabangda. Pada level Perangkat Daerah dikembangkan budaya kontrol tiap level dengan melakukan evaluasi berkala setiap triwulan terkait capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan rencana aksi. Pada level Inspektorat titik berat evaluasi bukan hanya pada aspek asses tetapi lebih kepada asist agar kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah menjadi lebih baik lagi. Pada level Bappelitbangda pola perencanaan bukan hanya didasarkan pada tahapan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, tetapi juga memperhatikan capaian kinerja sesuai dengan laporan kinerja yang telah dibuat perangkat daerah dan memperhatikan hasil evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh Inspektorat.

Capaian Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas tahun 2023 bila dikaitkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 37
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas terhadap
Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	
		2023	Target Akhir Renstra
Target	Persen	22,73	22,73
Realisasi	Persen	20,45	20,45

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2023

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas Pada tahun 2023 tercapai hanya sebesar 20,45 persen jika dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2023 sebesar 22,73 persen, maka kedepan Sekretariat Daerah Kota Bekasi harus meningkatkan target kinerja untuk dapat mengejar ketertinggalan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 38
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan
Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase OPD yang
menerapkan SAKIP berkualitas

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	Program Administrasi Umum	200,000,000	150,422,758	75.21	89,97	14,76
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	200,000,000	150,422,758	75.21		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2023, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 1 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 150,422,758,00 (Seratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas hanya mencapai 75,21 persen.

Jika dikaitkan dengan capaian Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas sebesar 20,45 persen dari target sebesar 22,73 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 89,97 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan masih efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14,76 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi *capaian* kinerja terlampaui dan ini dapat juga diartikan bahwa Sekretariat Daerah dapat meningkatkan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 3. 39
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 dengan tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2022	2023
1	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	Persen	25	20,45

Sumber : Data Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Organisasi Setda tahun 2022-2023, diolah

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada Anggaran tahun 2023 sebelum

perubahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 217.126.661.696,00 yang kemudian terkoreksi pada penetapan APBD Perubahan Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 238.486.439.083,00 yang dijabarkan dalam 3 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 40
Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Per Program Tahun 2023

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	Program Administrasi Umum	161,138,682,640	177,178,624,231
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	48,173,279,056	53,539,716,852
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	7,814,700,000	7,768,098,000
	TOTAL	217,126,661,696	238,486,439,083

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIPD Kemendagri tahun 2023, diolah

Total anggaran Sekretariat Daerah berubah pada saat penetapan P-APBD menjadi Rp. 205,707,195,656,- dengan realisasi sebesar Rp. 186,124,409,401,- (89,16%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 41
Pagu Dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Setelah P-APBD Per Program Tahun 2023

No	Program Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1.	Program Administrasi Umum	177,178,624,231	163,793,668,152	92.45%
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	53,539,716,852	50,306,198,677	93.96%
3.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	7,768,098,000	6,952,043,333	89.49%
	Total	238,486,439,083	221,051,910,162	92.69%

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi EMONEV tahun 2023

Penyerapan anggaran sebesar 92,69% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sasaran program yang tepat melalui perencanaan yang optimal memperlancar pelaksanaan aktivitas/program yang pada akhirnya berimplikasi pada idealnya penyerapan anggaran
2. proses pengadaan barang dan jasa melalui penyedia/swakelola secara efisien dan efektif serta tepat waktu mempermudah penyerapan anggaran.
3. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi mempercepat proses penyerapan anggaran.

Tabel 3. 42
Pagu Dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Setelah P-APBD Per Sub Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	%
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	161,138,682,640	177,178,624,231	163,793,668,152	92.45%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000	100,000,000	92,606,500	92.61%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,000,000	100,000,000	92,606,500	92.61%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52,416,301,840	52,466,301,840	50,706,356,214	96.65%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52,366,301,840	52,416,301,840	50,658,866,214	96.65%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50,000,000	50,000,000	47,490,000	94.98%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	175,000,000	175,000,000	128,079,000	73.19%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	175,000,000	175,000,000	128,079,000	73.19%

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	450,000,000	450,000,000	114,455,000	25.43%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	450,000,000	450,000,000	114,455,000	25.43%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,750,000,000	9,388,755,500	8,316,577,822	88.58%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150,000,000	205,957,500	196,213,500	95.27%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,900,000,000	5,882,500,000	5,233,189,400	88.96%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300,000,000	498,500,000	477,620,000	95.81%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,000,000	100,000,000	80,000,000	80.00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	500,000,000	500,000,000	448,810,000	89.76%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,700,000,000	2,101,798,000	1,785,609,922	84.96%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100,000,000	100,000,000	95,135,000	95.14%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34,090,500,000	45,511,857,866	41,067,189,420	90.23%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6,000,000,000	16,685,357,866	15,687,581,000	94.02%
Pengadaan Mebel	21,090,500,000	21,090,500,000	18,054,029,920	85.60%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,000,000,000	7,736,000,000	7,325,578,500	94.69%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23,003,783,800	22,790,814,025	21,369,323,988	93.76%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7,536,759,800	7,880,759,800	7,145,878,233	90.67%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,200,000,000	1,200,000,000	884,047,335	73.67%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14,262,024,000	13,705,054,225	13,339,398,420	97.33%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27,600,000,000	30,475,000,000	28,653,780,637	94.02%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	900,000,000	1,400,000,000	1,282,979,631	91.64%

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	900,000,000	1,500,000,000	1,193,278,242	79.55%
Pemeliharaan Mebel	300,000,000	300,000,000	79,667,586	26.56%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23,400,000,000	24,900,000,000	23,794,944,115	95.56%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,100,000,000	2,375,000,000	2,302,911,063	96.96%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5,516,657,000	5,491,657,000	4,671,663,342	85.07%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	648,649,000	648,649,000	405,964,667	62.59%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150,000,000	150,000,000	146,967,800	97.98%
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50,000,000	25,000,000	17,672,000	70.69%
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4,668,008,000	4,668,008,000	4,101,058,875	87.85%
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3,686,440,000	2,967,220,000	2,319,595,714	78.17%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	790,220,000	1,005,100,000	812,714,853	80.86%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	896,220,000	249,120,000	175,000,000	70.25%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2,000,000,000	1,713,000,000	1,331,880,861	77.75%
Penataan Organisasi	850,000,000	813,402,000	640,160,745	78.70%
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	300,000,000	263,402,000	202,641,866	76.93%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	250,000,000	250,000,000	220,441,291	88.18%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100,000,000	100,000,000	66,654,830	66.65%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	200,000,000	200,000,000	150,422,758	75.21%
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6,500,000,000	6,548,616,000	5,713,879,770	87.25%
Fasilitasi Keprotokolan	570,000,000	618,616,000	583,970,000	94.40%

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1,930,000,000	1,930,000,000	1,390,890,000	72.07%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4,000,000,000	4,000,000,000	3,739,019,770	93.48%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	48,173,279,056	53,539,716,852	50,306,198,677	93.96%
Administrasi Tata Pemerintahan	14,663,240,200	18,920,480,996	17,738,674,361	93.75%
Penataan Administrasi Pemerintahan	300,000,000	4,436,683,796	4,114,477,121	92.74%
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	13,663,240,200	13,888,957,200	13,289,405,700	95.68%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	700,000,000	594,840,000	334,791,540	56.28%
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	30,960,038,856	32,329,235,856	30,769,669,341	95.18%
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6,500,000,000	6,500,000,000	5,939,643,341	91.38%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	7,500,000,000	8,118,000,000	7,651,526,000	94.25%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	16,960,038,856	17,711,235,856	17,178,500,000	96.99%
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,450,000,000	1,190,000,000	806,736,721	67.79%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	750,000,000	750,000,000	600,223,571	80.03%
Fasilitasi Bantuan Hukum	550,000,000	368,000,000	137,885,350	37.47%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	150,000,000	72,000,000	68,627,800	95.32%
Fasilitasi Kerjasama Daerah	1,100,000,000	1,100,000,000	991,118,254	90.10%
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1,000,000,000	1,000,000,000	908,647,654	90.86%
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	100,000,000	100,000,000	82,470,600	82.47%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	7,814,700,000	7,768,098,000	6,952,043,333	89.49%
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1,089,700,000	1,065,920,000	773,476,488	72.56%
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	764,700,000	575,920,000	349,994,488	60.77%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	150,000,000	150,000,000	148,175,000	98.78%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	175,000,000	340,000,000	275,307,000	80.97%
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4,950,000,000	4,927,178,000	4,754,859,488	96.50%

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	%
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	200,000,000	200,000,000	184,872,518	92.44%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4,550,000,000	4,527,178,000	4,370,650,500	96.54%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	200,000,000	200,000,000	199,336,470	99.67%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,775,000,000	1,775,000,000	1,423,707,357	80.21%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	725,000,000	725,000,000	673,237,105	92.86%
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	700,000,000	700,000,000	495,423,252	70.77%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	350,000,000	350,000,000	255,047,000	72.87%
TOTAL ANGGARAN	217,126,661,696	238,486,439,083	221,051,910,162	92.69%

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi EMONEV tahun 2023

3.5 Prestasi Dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan Yang Diperoleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 43
Prestasi dan penghargaan Yang Diperoleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023

No	Tanggal	Uraian	Penghargaan Dari
1	15 Maret 2023	Penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Presiden RI
2	15 Maret 2023	Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022	Ombudsman RI
3	20 Mei 2023	Predikat Pupuhu Pangaping di Hari Pers Nasional Jawa Barat	Persatuan Wartawan Indonesia
4	30 November 2023	Penghargaan Sebagai Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif Dalam E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Jawa Barat Tahun 2023	KI Prov Jabar

Sumber: Data Bagian Humas, 2023



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis sebagai upaya pemenuhan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk menuju penyelenggaraan *good governance* Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2023.

4.1 kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 Sasaran Strategis yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 (enam) Indikator Sasaran / Indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi 12 (dua belas) Bagian di Sekretariat Daerah Kota Bekasi, dengan hasil capaian realisasi kinerja rata-rata sebesar 108,12 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang SANGAT BAIK dan signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Beberapa poin penting akan dijabarkan dibawah ini:

1. Pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan

kesejahteraan sosial terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran, sebesar 125 persen.

2. Pencapaian sasaran strategis 2 Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran, sebesar 100,81 persen
3. Pencapaian sasaran strategis 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja, memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebesar 98,54 persen.

Berdasarkan rata-rata setiap sasaran tersebut dapat dihasilkan rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2023 yaitu 108,12 persen Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2023 ada pada Melampaui/memenuhi Target. Capaian dari IKU tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Capaian dari IKU tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Persentase Capaian IKK yang meningkat	Persen	40	50
2	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Persen	88	89,414
3	Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi	Persen	100	100
4	Nilai AKIP SETDA	Nilai	A	A
5	Nilai IKM SETDA	Angka	83	87,7
6	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	Persen	22,73	20,45

Dari enam target IKU yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 keseluruhan indikator dapat dicapai bahkan untuk beberapa indikator dapat melampaui target.

Walaupun secara umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi dapat melampaui target kinerja yang telah ditetapkan namun

masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Daerah antara lain adalah :

1. Belum optimalnya pemahaman atas data - data yang terkait dengan informasi kinerja, sehingga tidak memberikan informasi yang cukup bagi penyusun untuk melakukan analisis atas capaian kinerja. Data yang tersedia umumnya hanya data penyerapan anggaran serta realisasi fisik pekerjaan yang bersifat keluaran (output).
2. Belum optimalnya koordinasi perencanaan antar Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi, sehingga masih terdapat kecenderungan perencanaan bersifat sektoral dan menyebabkan daya dorong terhadap tercapainya impact (dampak) dari program kegiatan Sekretariat Daerah belum maksimal.

4.2 Rencana Tindak

Untuk lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung ketercapaian visi dan misi, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan fungsi Sekretariat Daerah sebagai perumus kebijakan, koordinator pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/ kegiatan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja sekretariat daerah melalui koordinasi internal Sekretariat Daerah, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-

kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Sekretariat Daerah.

4. Secara internal perlu adanya peningkatan kualitas koordinasi antar Bagian sehingga dapat integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran lingkup Sekretariat Daerah dapat terlaksana dengan optimal;

Sebagai upaya meningkatkan dan mempertahankan kinerja diharapkan bahwa LKIP tahun 2023 ini dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang di Lingkup Sekretariat Daerah.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja



WALI KOTA BEKASI

PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN KEPALA DAERAH PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini saya sebagai Pengguna Anggaran (PA):

Nama : Drs. JUNAEDI
NIP : 19661006 198903 1 006
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Pih. Sekretaris Daerah

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO
Jabatan : Pih. WALI KOTA BEKASI

Sesaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA
Pih. WALI KOTA BEKASI

PIHAK PERTAMA
Pih. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS TATA RUANG



Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO

Drs. JUNAEDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19850205 198011 2 002

Jumlah Anggaran

1. Program Administrasi Umum	Rp	161.138.682.640
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	48.173.279.056
3. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	7.814.700.000

Keterangan

Anggaran APBD	Rp	217.126.691.696
Anggaran Dekonsentrasi/TP	Rp	-

Bekasi, 2 Januari 2023

 PIHAK KEDUA,
 PIL. WALI KOTA BEKASI,


 Dr. TRI ADHANTO T.JAHYONO

 PIHAK PERTAMA,
 Pih. SEKRETARIS DAERAH
 KEPALA DINAS TATA RUANG,


 Drs. JUNAEDI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661006 198603 1 008

Lampiran I : Indikator Kinerja

 Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah
 Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target Per Triwulan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial	Persentase Capaian IKK yang meningkat	%	40	Triwulan I	40
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	-
2	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Angka	88	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	88
		Persentase BUMD yang dibina dan diawasi	%	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP SETDA	Nilai	A	Triwulan I	-
					Triwulan II	A
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	-
		Nilai IKM	Angka	83	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	83
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	Persen	22.73	Triwulan I	-
					Triwulan II	22.73
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	-

LAMPIRAN 2 : Perjanjian Kinerja Perubahan



WALI KOTA BEKASI

**PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH DENGAN KEPALA DAERAH PADA
APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini saya sebagai Pengguna Anggaran (PA):

Nama : Drs. JUNAEDI
NIP : 19661006 198603 1 008
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/ IV.c
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : R. GANI MUHAMAD
Jabatan : Pj. WALI KOTA BEKASI

selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan memenuhi target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA,
Pj. WALI KOTA BEKASI**

Bekasi, 8 November 2023
**PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DAERAH**

R. GANI MUHAMAD

Drs. JUNAEDI
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19661006 198603 1 008

Lampiran : Indikator Kinerja

Peringkat Daerah : Sekretariat Daerah
 Tahun Anggaran : 2023

No.	Sesaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial	Persentase Capaian IKK yang meningkat	40%
2	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	88
		Persentase RUMI yang dibina dan diwacai	100%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP SETDA	A
		Nilai IKM	85
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	22,73%

Jumlah Anggaran

1. Program Administrasi Umum	Rp. 177.178.624,231	Keterangan	Rp. 217.125.661,030
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 53.530.716,862	Anggaran Dekonsentrasi/TP	Rp. -
3. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 7.768.095,000	Anggaran Perubahan APBD	Rp. 238.485.438,050

Bekasi, 6 November 2023

PIHAK KEDUA,
 Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMMAD

PIHAK PERTAMA,
 SEKRETARIS DAERAH



Drs. JUNAEI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661026 198303 1 008

LAMPIRAN 3
Rincian Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	161,138,682,640	177,178,624,231
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000	100,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,000,000	100,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52,416,301,840	52,466,301,840
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52,366,301,840	52,416,301,840
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50,000,000	50,000,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	175,000,000	175,000,000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	175,000,000	175,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	450,000,000	450,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	450,000,000	450,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,750,000,000	9,388,755,500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150,000,000	205,957,500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,900,000,000	5,882,500,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300,000,000	498,500,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,000,000	100,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	500,000,000	500,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,700,000,000	2,101,798,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100,000,000	100,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34,090,500,000	45,511,857,866
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6,000,000,000	16,685,357,866
Pengadaan Mebel	21,090,500,000	21,090,500,000

Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,000,000,000	7,736,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23,003,783,800	22,790,814,025
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	5,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7,536,759,800	7,880,759,800
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,200,000,000	1,200,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14,262,024,000	13,705,054,225
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27,600,000,000	30,475,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	900,000,000	1,400,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	900,000,000	1,500,000,000
Pemeliharaan Mebel	300,000,000	300,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23,400,000,000	24,900,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,100,000,000	2,375,000,000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5,516,657,000	5,491,657,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	648,649,000	648,649,000
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150,000,000	150,000,000
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50,000,000	25,000,000
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4,668,008,000	4,668,008,000

Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3,686,440,000	2,967,220,000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	790,220,000	1,005,100,000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	896,220,000	249,120,000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2,000,000,000	1,713,000,000
Penataan Organisasi	850,000,000	813,402,000
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	300,000,000	263,402,000
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	250,000,000	250,000,000
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100,000,000	100,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	200,000,000	200,000,000
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6,500,000,000	6,548,616,000
Fasilitasi Keprotokolan	570,000,000	618,616,000
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1,930,000,000	1,930,000,000
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4,000,000,000	4,000,000,000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	48,173,279,056	53,539,716,852
Administrasi Tata Pemerintahan	14,663,240,200	18,920,480,996
Penataan Administrasi Pemerintahan	300,000,000	4,436,683,796
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	13,663,240,200	13,888,957,200
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	700,000,000	594,840,000
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	30,960,038,856	32,329,235,856
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6,500,000,000	6,500,000,000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	7,500,000,000	8,118,000,000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	16,960,038,856	17,711,235,856
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,450,000,000	1,190,000,000
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	750,000,000	750,000,000
Fasilitasi Bantuan Hukum	550,000,000	368,000,000

Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	150,000,000	72,000,000
Fasilitasi Kerjasama Daerah	1,100,000,000	1,100,000,000
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1,000,000,000	1,000,000,000
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	100,000,000	100,000,000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	7,814,700,000	7,768,098,000
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1,089,700,000	1,065,920,000
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	764,700,000	575,920,000
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	150,000,000	150,000,000
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	175,000,000	340,000,000
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4,950,000,000	4,927,178,000
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	200,000,000	200,000,000
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4,550,000,000	4,527,178,000
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	200,000,000	200,000,000
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,775,000,000	1,775,000,000
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	725,000,000	725,000,000
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	700,000,000	700,000,000
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	350,000,000	350,000,000
TOTAL ANGGARAN	217,126,661,696	238,486,439,083

LAMPIRAN 4

Realisasi Fisik Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV		ket
						Fisik	Anggaran (%)							
					238,486,439,083									
I	Program Administrasi Umum	Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Target	100%	177,178,624,231		15.24		25.48		27.18		32.09	
			Realisasi				10.18		19.28		25.32		37.61	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Target	100%	100,000,000	25%	-	25%	-	25%	100.00	25%	0.00	
			Realisasi				-	-		-		-		-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Target	20 Dok	100,000,000	9 Dok	-	3 Dok	-	6 Dok	100	2 Dok	-	
			Realisasi				9 Dok	-	3 Dok	-	6 Dok	-	2 Dok	92.61
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	Target	100%	52,466,301,840	25%	17.21	25%	33.06	25%	23.91	25%	25.82	
			Realisasi					16.05		31.34		21.95		27.30
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Target	5474 OB	52,416,301,840	1368 OB	17.20	1369 OB	33.06	1369 OB	23.91	1368 OB	25.83	
			Realisasi				1015 OB	16.07	1864 OB	31.36	1415 OB	21.95	1383 OB	27.27
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Target	14 Lap	50,000,000	3 Lap	20.00	4 Lap	30.00	3 Lap	30.00	4 Lap	20.00	
			Realisasi				3 Lap	-	4 Lap	16.86	3 Lap	18.33	4 Lap	59.79

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV		ket
						Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Target	100%	450,000,000	25%	16.67	25%	52.78	25%	19.89	25%	10.67	
			Realisasi				-		7.31		4.76		13.36	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Target	380 Orang	450,000,000	-	16.67	-	52.78	-	19.89	380 Orang	10.67	
			Realisasi			-	-	11 Orang	7.31	11 Orang	4.76	8 Orang	13.36	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Target	100%	9,388,755,500		33.53		19.58		15.10	100%	31.79	
			Realisasi				4.43		21.39		20.03		42.73	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Target	60 Paket	205,957,500	47 Paket	72.83	-	-	-	-	13 Paket	27.17	
			Realisasi			47 Paket	-	-	71.39	-	-	13 Paket	23.88	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Target	37879 Paket	5,882,500,000	-	37.40	29083 Paket	17.24	8796 Paket	10.56	-	34.81	
			Realisasi			29083 Paket	2.99	-	20.15	8796 Paket	18.44	-	47.39	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Target	20774 Paket	498,500,000	1 Paket	47.54	1 Paket	6.32	18000 Paket	6.32	2771 Paket	39.82	
			Realisasi			1 Paket	-	2 Paket	31.78	18000 Paket	19.76	2771 Paket	44.27	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Target	2 Dok	100,000,000	-	25.00	2 Dok	25.00	-	-	-	50.00	
			Realisasi			-	-	1 Dok	13.00	1 Dok	13.00	-	54.00	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Target	4 Laporan	500,000,000	1 Lap	58.05	1 Lap	12.59	1 Lap	19.20	1 Lap	10.17	
			Realisasi			1 Lap	39.44	1 Lap	17.01	1 Lap	11.57	1 Lap	21.74	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Target	1 Laporan	2,101,798,000	-	11.69	-	28.78	-	31.85	1 Lap	27.68	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV		ket
						Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
	dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Realisasi			-	2.04	-	15.44	-	29.83	1 Lap	37.65	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Target	1 Dok	100,000,000	-	-	1 Dok	100.00	-	-	-	-	
			Realisasi			-	-	1 Dok	95.14	-	-	-	-	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Target	100%	22,790,814,025	25%	19.37	25%	27.55	25%	25.38	25%	27.68	
			Realisasi					17.23		22.97		24.33		29.24
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Target	1 Laporan	5,000,000	-	0.06	1 Lap	-	-	-	-	-	
			Realisasi			-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Target	12 Laporan	7,880,759,800	3 Lap	25.58	3 Lap	25.05	3 Lap	24.59	3 Lap	24.78	
			Realisasi			3 Lap	20.75	3 Lap	20.46	3 Lap	23.58	3 Lap	25.88	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Target	12 Laporan	1,200,000,000	3 Lap	1.13	3 Lap	60.54	3 Lap	23.33	3 Lap	15.00	
			Realisasi			3 Lap	-	3 Lap	13.19	3 Lap	23.71	3 Lap	36.77	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Target	12 Laporan	13,705,054,225	3 Lap	17.40	3 Lap	26.12	3 Lap	26.02	3 Lap	30.47	
			Realisasi			3 Lap	16.71	3 Lap	25.28	3 Lap	24.82	3 Lap	30.53	
6	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Target	100%	5,491,657,000	25%	26.39	25%	26.93	25%	24.21	25%	22.47	
			Realisasi					12.01		12.69		19.98		40.40
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala	Target	24 OB	648,649,000	6 OB	20.40	6 OB	35.20	6 OB	27.62	6 OB	16.78	
			Realisasi			4 OB	5.58	3 OB	20.72	3 OB	25.46	2 OB	10.83	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV		ket
						Fisik	Anggaran (%)							
	Wakil Kepala Daerah	Daerah dan Wakil Kepala Daerah												
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Target	54 Paket	150,000,000	27 Paket	50.00	27 Paket	50.00	-	-	-	-	
		Realisasi				11 Paket	-	27 Paket	32.63	-	7.17	16 Paket	58.18	
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Target	4 Orang	25,000,000	2 Orang	100.00	-	100.00	2 Orang	-	-	(100.00)	
		Realisasi				-	-	-	-	-	-	1 Orang	70.69	
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Target	24 OB	4,668,008,000	6 OB	26.07	6 OB	24.64	6 OB	24.64	6 OB	24.64	
		Realisasi				4 OB	13.35	3 OB	11.00	3 OB	19.73	2 OB	43.77	
7	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tingkat Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Target	100%	2,967,220,000	25%	32.20	25%	65.37	25%	18.99	25%	(16.56)	
		Realisasi					-		28.93		14.66		34.58	
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Target	12 Paket	1,005,100,000	3 Paket	14.22	3 Paket	14.57	3 Paket	37.36	3 Paket	33.86	
		Realisasi				3 Paket	-	3 Paket	17.06	3 Paket	12.61	3 Paket	51.19	
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Target	12 Paket	249,120,000	3 Paket	190.63	3 Paket	72.86	3 Paket	55.15	3 Paket	(218.65)	
		Realisasi				3 Paket	-	3 Paket	70.25	3 Paket	-	-	-	
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Target	12 Paket	1,713,000,000	3 Paket	19.71	3 Paket	94.09	3 Paket	2.96	3 Paket	(16.75)	
		Realisasi				3 Paket	-	3 Paket	29.88	3 Paket	18.00	3 Paket	29.87	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV		ket
						Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
8	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Target	100%	2,548,616,000	25%	41.98	25%	27.47	25%	17.66	25%	12.89	
			Realisasi				30.29		14.99		9.69		22.51	
1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Target	1 Laporan	618,616,000	-	92.14	-	-	-	-	1 Lap	7.86	
			Realisasi			-	86.91	-	-	-	-	1 Lap	7.49	
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Target	1 Laporan	1,930,000,000	-	25.91	-	36.27	-	23.32	1 Lap	14.51	
			Realisasi			-	12.15	-	19.80	-	12.79	1 Lap	27.33	
		Cakupan Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	Target	100%	4,000,000,000		5.00		39.63		52.78	100%	2.59	
			Realisasi				4.37		25.52		16.84		46.75	
9	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Target	100%	4,000,000,000		5.00		39.63		52.78		2.59	
			Realisasi				4.37		25.52		16.84		46.75	
1	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Target	6 Laporan	4,000,000,000	-	5.00	4 Lap	39.63	1 Lap	52.78	1 Lap	2.59	
			Realisasi			-	4.37	3 Lap	25.52	2 Lap	16.84	1 Lap	46.75	
		Presentase Ketersediaan gedung pemerintahan dalam kondisi baik	Target	100%	30,475,000,000		20.97		27.28		26.98		24.77	
			Realisasi				11.84		21.70		22.41		38.07	
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Target	100%	30,475,000,000	25%	20.97	25%	27.28	25%	26.98	25%	24.77	
			Realisasi				11.84		21.70		22.41		38.07	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Target	25 Unit	1,400,000,000	7 Unit	21.07	10 Unit	29.64	5 Unit	10.36	3 Unit	38.93	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV		ket
						Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Realisasi			4 Unit	13.03	9 Unit	24.92	12 Unit	13.06	-	40.64	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Target	143 Unit	1,500,000,000	35 Unit	17.00	40 Unit	27.33	38 Unit	12.67	30 Unit	43.00	
			Realisasi			29 Unit	1.52	40 Unit	21.47	54 Unit	18.47	20 Unit	38.09	
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Target	200 Unit	300,000,000	-	-	-	-	-	100.00	200 Unit	-	
			Realisasi			-	-	-	-	-	-	10 Unit	26.56	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Target	30 Unit	24,900,000,000	7 Unit	22.09	9 Unit	26.97	8 Unit	26.50	6 Unit	24.44	
			Realisasi			2 Unit	12.49	7 Unit	22.99	9 Unit	24.68	12 Unit	35.40	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Target	18 Unit	2,375,000,000	2 Unit	14.32	8 Unit	32.55	8 Unit	41.56	-	11.58	
			Realisasi			3 Unit	12.41	8 Unit	9.18	5 Unit	9.38	2 Unit	66.00	
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Kebutuhan	Target	100%	45,686,857,866		0.02		11.34		33.37		55.27	
			Realisasi				-		1.79		35.99		52.39	
11	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Target	100%	175,000,000		5.66		10.64		76.93	100%	6.77	
			Realisasi				-		2.83		70.36		-	
1	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	Target	4 Laporan	175,000,000	-	5.66	-	10.64	-	76.93	4 Lap	6.77	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV		ket
						Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
	Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Realisasi			1 Lap	-	1 Lap	2.83	1 Lap	70.36	1 Lap	-	
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	Target	100%	45,511,857,866		-		11.34		33.21	100%	55.45	
			Realisasi				-		1.78		35.85		52.60	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Target	76 Unit	16,685,357,866	-	-	3 Unit	26.06	-	4.87	22 Unit	69.07	
			Realisasi			-	-	3 Unit	-	25 Unit	23.37	48 Unit	70.65	
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Target	7780 Unit	21,090,500,000	-	-	-	-	-	38.47	7956 Unit	61.53	
			Realisasi			-	-	-	-	7700 Unit	38.47	-	47.13	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Target	685 Unit	7,736,000,000	-	-	-	10.50	660 Unit	79.99	-	9.51	
			Realisasi			-	-	323 Unit	10.50	362 Unit	55.66	-	28.54	
		Persentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	Target	100%	613,402,000		31.79		30.71		40.15	100%	(2.65)	
			Realisasi				7.48		6.40		19.45		46.50	
13	Penataan Organisasi	Persentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	Target	100%	613,402,000		31.79		30.71		40.15		(2.65)	
			Realisasi				7.48		6.40		19.45		46.50	
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Target	2 Dok	263,402,000	-	26.45	-	34.67	-	51.95	2 Dok	(13.07)	
			Realisasi			-	11.65	-	3.30	-	14.72	2 Dok	47.26	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV		ket
						Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Target	2 Laporan	250,000,000	-	38.10	-	26.54	-	32.24	2 Lap	3.12	
			Realisasi			-	6.09	-	8.43	-	23.28	2 Lap	50.38	
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Target	1 Dok	100,000,000	-	30.06	-	30.69	-	28.87	1 Dok	10.39	
			Realisasi			-	-	-	9.51	-	22.33	1 Dok	34.82	
		Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	Target	100%	200,000,000		37.70		33.33		24.25		4.73	
			Realisasi				9.34		3.15		28.30		34.43	
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	Target	75%	200,000,000		37.70		33.33		24.25	75%	4.73	
			Realisasi				9.34		3.15		28.30		34.43	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Target	1 Dok	200,000,000	-	37.70	-	33.33	-	24.25	1 Dok	4.73	
			Realisasi			-	9.34	-	3.15	-	28.30	1 Dok	34.43	
II	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan	Target		53,539,716,852		26.26		27.39		25.98		20.38	
			Realisasi				0.30		23.45		25.45		44.76	
		Presentase peningkatan profile kelurahan	Target											
			Realisasi											
		Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah	Target											
			Realisasi											
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan dalam rangka pelaksanaan administrasi tata pemerintahan	Target	13 Keg	18,920,480,996		62.20		3.49		11.33		22.98	
			Realisasi				-		1.54		64.01		28.20	
		Target	271 Keg											
		Realisasi												
1			Target	5 Dok	4,436,683,796	-	0.25	1 Dok	2.08	-	2.98	1 Dok	94.69	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV		ket
						Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Realisasi			-	-	2 Dok	0.08	-	1.87	3 Dok	90.78	
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Target	5 Dok	13,888,957,200	-	82.55	3 Dok	3.57	4 Dok	12.16	-	1.72	
			Realisasi			-	-	-	1.44	4 Dok	85.90	1 Dok	8.34	
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Target	3 Dok	594,840,000	3 Dok	49.07	-	12.29	-	54.15	-	(15.51)	
			Realisasi			3 Dok	-	-	14.95	-	16.25	-	25.08	
		Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan, hari besar nasional dan hari besar lainnya	Target	100%	32,329,235,856		6.07		41.01			100%		
			Realisasi				0.49		37.39					
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	Target	100%								100%		
			Realisasi											
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Target	25 Keg	32,329,235,856		6.07		41.01		34.02		18.90	
			Realisasi				0.49		37.39		3.51		53.79	
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Target	9 Dok	6,500,000,000	1 Dok	19.40	3 Dok	26.91	2 Dok	41.68	3 Dok	12.01	
			Realisasi			1 Dok	2.44	3 Dok	34.97	2 Dok	17.29	3 Dok	36.68	
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,	Target	1 Dok	8,118,000,000	-	-	-	-	-	0.77	1 Dok	6.16	
			Realisasi			-	-	1 Dok	-	-	0.05	-	2.79	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV		ket	
						Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)		
		Pemberdayaan Masyarakat													
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Target	1 Dok	17,711,235,856	-	3.95	-	22.74	-	46.04	1 Dok	27.26	Penerimaan hibah sesuai dengan proposal yang sudah lengkap	
Realisasi				-		-	-	13.55	-	-	1 Dok	83.44			
		Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	Target	100%	1,190,000,000		15.89		27.28			100%			
			Realisasi				-		3.98						
		Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	Target	100%								100%			
			Realisasi												
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang diundangkan	Target	3 Jenis	1,190,000,000		15.89		27.28		23.22		33.61		
			Realisasi				-		3.98		5.10		58.72		
		Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang diundangkan	Target	1253 Produk Hukum											
			Realisasi												

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV		ket
						Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Target	8 Dok	750,000,000	-	4.60	-	7.54	8 Dok	11.22	-	76.64	
			Realisasi			-	-	-	1.65	1 Dok	2.09	7 Dok	76.29	
2	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	Target	3 Dok	72,000,000	-	47.00	1 Dok	118.24	1 Dok	43.09	1 Dok	(108.33)	
			Realisasi			-	-	2 Dok	20.19	-	43.88	1 Dok	31.25	
3	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Target	8 Kasus	368,000,000	2 Kasus	32.82	2 Kasus	49.71	2 Kasus	43.81	2 Kasus	(26.34)	
			Realisasi			2 Kasus	-	-	5.57	4 Kasus	3.63	2 Kasus	28.26	
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah	Target	100%	1,100,000,000		12.86		38.11		44.31	100%	4.72	
			Realisasi				0.16		11.64		29.17		49.13	
4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Target	7 Keg	1,100,000,000		12.86		38.11		44.31		4.72	
			Realisasi				0.16		11.64		29.17		49.13	
1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Target	4 Dok	1,000,000,000	-	11.70	1 Dok	39.19	-	46.23	3 Dok	2.87	
			Realisasi			-	-	1 Dok	11.83	-	28.56	3 Dok	50.48	
2	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Target	1 Lap	100,000,000	-	24.40	-	27.30	-	25.10	1 Lap	23.19	
			Realisasi			-	1.80	-	9.75	-	35.26	1 Lap	35.66	
III	Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Bidang Usaha BUMD	Target	5 Bidang Usaha	7,768,098,000		18.53		32.05		31.94	5 Bidang Usaha	17.48	
			Realisasi				8.70		20.62		22.51		37.67	
		Persentase Peningkatan Deviden BUMD	Target	3%								3%		
			Realisasi											
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	Target	100%								100%		
			Realisasi											
1			Target	8 Dok			6.63		24.57		80.85		(12.05)	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV		ket
						Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen kebijakan ekonomi	Realisasi		1,065,920,000		-		1.89		5.38		65.30	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Target	3 Dok	575,920,000	-	12.26	-	39.86	3 Dok	80.66	-	(32.78)	
			Realisasi			-	-	-	3.50	1 Dok	-	2 Dok	57.27	
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Target	1 Lap	150,000,000	-	-	-	-	1 Lap	100.00	-	-	
			Realisasi			-	-	-	-	1 Lap	-	-	98.78	
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Target	1 Dok	340,000,000	-	-	-	9.52	-	72.74	1 Dok	17.75	
			Realisasi			-	-	-	-	-	16.86	1 Dok	64.12	
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pembangunan	Target	100%	4,927,178,000		14.84		33.32		24.66	100%	27.18	
			Realisasi				13.10		29.60		25.04		28.76	
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen administrasi pembangunan	Target	155 Dok	4,927,178,000		14.84		33.32		24.66		27.18	
			Realisasi				13.10		29.60		25.04		28.76	
		Jumlah pelaksanaan administrasi pembangunan	Target	5 Keg										
			Realisasi											
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Target	2 Dok	200,000,000	-	25.46	-	39.22	1 Dok	30.07	1 Dok	5.25	
			Realisasi			-	7.80	2 Dok	27.12	-	37.81	-	19.70	
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Target	11 Laporan	4,527,178,000	2 Lap	15.03	3 Lap	33.64	3 Lap	22.68	3 Lap	28.65	
			Realisasi			2 Lap	13.92	3 Lap	31.02	1 Lap	21.87	6 Lap	29.74	
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Target	18 Laporan	200,000,000	4 Lap	0.00	5 Lap	20.22	4 Lap	64.02	5 Lap	15.75	
			Realisasi			4 Lap	-	4 Lap	-	4 Lap	84.00	6 Lap	15.67	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV		ket
						Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
		Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Target	100%	1,775,000,000		35.94		33.01		22.78	100%	8.27	
			Realisasi				1.69		6.93		25.79		45.81	
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah fasilitasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Target	8 Keg	1,775,000,000		35.94		33.01		22.78		8.27	
			Realisasi				1.69		6.93		25.79		45.81	
		Jumlah fasilitasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Target	1 Dok										
			Realisasi											
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Target	1 Dok	725,000,000	-	42.45	-	29.98	-	20.57	1 Dok	7.01	
			Realisasi				-	0.62	-	15.23	-	9.19	1 Dok	67.83
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Target	1 Dok	700,000,000	-	44.96	-	24.85	-	16.47	1 Dok	13.71	
			Realisasi				-	2.99	-	0.37	-	40.21	1 Dok	27.20
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Target	304 Orang	350,000,000	-	4.42	-	55.60	-	39.98	304 Orang	-	
			Realisasi				-	1.28	-	2.86	19 Orang	31.33	18 Orang	37.41

LAMPIRAN 5 Prestasi Dan Penghargaan

1. Penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri



2. Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022



3. Predikat Pupuhu Pangaping di Hari Pers Nasional Jawa Barat



4. Penghargaan Sebagai Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif Dalam E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Jawa Barat Tahun 2023

